

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PENGEMIS DI KOTA TANGERANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik



Oleh :

AJI DEWANTORO

NIM : 6661131458

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2019

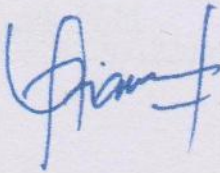
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Aji Dewantoro
NIM : 6661131458
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM
MENANGANI MASALAH PENGEMIS DI KOTA
TANGERANG

Serang, 10 Oktober 2018

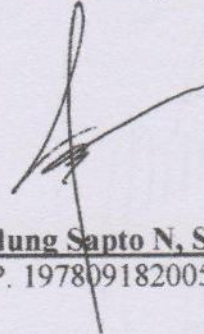
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan
Menyetujui,

Pembimbing I



Titi Stiawati, S.Sos., M.Si
NIP. 197011252005012001

Pembimbing II



Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si
NIP. 197809182005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Saitan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sijafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Judul Skripsi : Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani Masalah
Pengemis di Kota Tangerang

Telah diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 21 Januari
Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 21 Januari 2019

Ketua Penguji :

Listyaningsih, M.Si

NIP. 197603292003122001

Anggota :

Dr. Gandung Ismanto, MM

NIP. 197408072005011001

Anggota :

Titi Stiawati, M.Si

NIP. 197011252005012001

Mengetahui,

**Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



Dr. Agus Sja'ari, M.Si
NIP. 197108242005011002

**Ketua Program Studi
Administrasi Publik**



Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 04 Januari 1996

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang”** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 21 Januari 2019



Aji Dewantoro

NIM. 6661131458

MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

“Patience is needed when you want to achieve a success”

Persembahan :

“Skripsi ini kupersembahkan untuk

Kedua Orang Tua ku Tercinta

Serta adik kesayangan saya dan

juga atas Bimbingan, Do’a,

Motivasi secara moral selama

penyusunan Skripsi ini

berlangsung.”

ABSTRAK

Aji Dewantoro. NIM. 6661131458. 2019. Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.; Dosen Pembimbing II, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si.

Penanganan pengemis merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dalam melihat fenomena pengemis di Kota Tangerang sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Permasalahannya, kurangnya penegakkan perda nomor 5 tahun 2012, para pengemis umumnya berasal dari luar Kota Tangerang, lemahnya pengawasan dari Dinas Sosial dan instant terkait, dan tidak adanya lahan untuk pembuatan panti rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan mengenai masalah pengemis di Kota Tangerang dan menjelaskan proses Implementasi peraturan daerah di Dinas Sosial Kota Tangerang. Teori yang digunakan yaitu teori Manajemen strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9) meliputi: *Environmental Scanning, Strategy Formulation, Strategy Implementation, Evaluation and Control*, dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian bahwa penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 masih berjalan kurang maksimal, para pengemis mayoritas berasal dari luar Kota Tangerang dan kembali melakukan mengemis walaupun sudah dilakukan pembinaan, proses pengawasan terhadap pengemis masih belum berjalan dengan baik dan belum tersedianya lahan untuk pembuatan Panti Rehabilitasi Sosial sendiri dan masih terdapat masalah di bagian Program, Anggaran dan juga Prosedur. Saran, Penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat, memastikan jumlah pengemis bisa berkurang setiap bulannya, melakukan pengawasan lebih giat lagi kepada para pengemis, dan segera membuat Panti Rehabilitasi Sosial sendiri di Kota Tangerang.

Kata Kunci : Implementasi, Pengemis, Strategi

ABSTRACT

Aji Dewantoro. NIM. 6661131458. 2019. Implementation Strategic Social Agency in dealing with Beggars in Tangerang City. Program Study Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Supervisor, Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.; 2nd Supervisor, Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si.

Beggars handling is the responsibility of the Department of Social Affairs in seeing the phenomenon of beggars in the City of Tangerang in accordance with what is stated in regional regulation number 5 of 2012 concerning the development of street children, homeless people, beggars and buskers. The problem is lack of enforcement of regional regulation number 5 in 2012, beggars generally come from outside the city of Tangerang, weak supervision from the Social and Instant Relevant Office, and the absence of land for the creation of social rehabilitation institutions. The purpose of this study is to explained about the problem of beggars in Tangerang City and explained the process of implementing regional regulations in the Tangerang City Social Service. The theory used is strategy management theory according to J. David Hunger and Thomas L. Wheelen (1996: 9) include: Environmental Scanning, Strategy Formulation, Strategy Implementation, Evaluation and Control, with a qualitative method descriptive approach. The result of the research shows that enforcement of regional regulations Number 5 of 2012 is still not optimal, the majority of beggars come from outside the city of Tangerang and go back to begging even though guidance has been carried out, the process of supervision of beggars is still not going well and there is no land available for the manufacture of social rehabilitation homes and still there are problems in the Program, Budget and Procedures section. Suggestion, Enforcement of regional regulations Number 5 of 2012 by providing a socialization to the community, ensuring the number of beggars can be reduced every month, conducting more active supervision of beggars, and immediately making their own Social Rehabilitation Institutions in Tangerang City.

Keywords : Beggar, Implementation, Strategic

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **Implementasi Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang**. Penelitian skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas akhir Studi Strata Satu (S1) untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kesempurnaan pada penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan masukan untuk menambah wawasan terkait bidang yang diteliti oleh penulis. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. H. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam mengembangkan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Bapak Deden M. Haris, S.Sos., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kuliah saya dari semester awal sampai semester akhir ini.
9. Ibu Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan waktu, tenaga, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
10. Kepada seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu, yang telah membekali ilmu

selama perkuliahan dan membantu dalam memberikan informasi selama proses perkuliahan.

11. Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
12. Kepada seluruh saudara dan keluarga yang telah mendoakan, memberi semangat dan motivasi.
13. Teman-teman Angkatan 2013 Ilmu Administrasi Publik selama menuntut ilmu. Terima kasih atas semua kenangan selama empat tahun perkuliahan kalian luar biasa.
14. Kepada para sahabatku yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa yaitu Fachri Ardiansyah, Talita Fitrianti, Nurul Fazriah Ramadhan, Gita Fauziah, Sony Atmaja, Hanif Rivaldi, Ester Magdalena, Prasetyo Budiutomo, Najmudin dan Iqlima Rahmawati.
15. Kepada para sahabat seperjuanganku yang menjadi partner dalam memperoleh Gelar S1 yang selalu ada disaat suka maupun duka yaitu Masdi, Hamdan Nurkholis, Nucky Nugraha, Pindo Prayogi, Asep Saripudin, Eko Nurcahyo, Ahmad Hidayat, Randi Alifio Yori, Luqman Abdul Ghoni, Agung Sudrajat, Ahmad Muqimul Haq, Jaka Permana, Nadiya Aisyah Puteri, dan Hanifah Yuliani.
16. Kepada teman-teman kelas C Ilmu Administrasi Publik yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan selalu ada disaat duka selama menjalani perkuliahan yaitu Pindo Prayogi, Masdi, Eko Nurcahyo, Ahmad Hidayat, Ahmad Muqimul Haq, Maulana Aditya Wilman,

Ferdy Ardiansyah, Ali Ulumudin, Akhmad Rohayudin, Jaka Maulana,
serta teman-teman lainnya.

17. Serta semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis untuk memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan doa yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan yang terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Penulis mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Serang, 16 Januari 2019

Penulis

Aji Dewantoro

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Lembar Orisinalitas	
Motto dan Persembahan	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	15
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	16
1.6.2 Manfaat Praktis	17
1.7 Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori.....	23
2.1.1 Pengertian Manajemen	24

2.1.2 Pengertian Manajemen Strategi.....	31
2.1.3 Pengertian Implementasi Strategi.....	47
2.1.4 Pengertian Pengemis	48
2.2 Penelitian Terdahulu	53
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	56
2.4 Asumsi Dasar Penelitian	59

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	61
3.2 Fokus Penelitian.....	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	62
3.4 Variabel Penelitian.....	63
3.4.1 Definisi Konsep	63
3.4.2 Definisi Operasional	64
3.5 Instrumen Penelitian.....	65
3.6 Informan Penelitian.....	71
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	74
3.8 Uji Keabsahan Data.....	77
3.9 Jadwal dan Waktu Penelitian	79

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	81
4.1.1 Profil Kota Tangerang.....	81
4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Tangerang	83
4.1.2 Deskripsi Dinas Sosial Kota Tangerang	84
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Tangerang	85
4.1.2.2 Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Tangerang	86
4.1.2.3 Fungsi Dinas Sosial Kota Tangerang	86
4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang	87
4.1.3 Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang	88
4.1.3.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	89

4.1.3.2 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja.....	89
4.1.3.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang	90
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	91
4.3 Deskripsi dan Analisis Data Penelitian	93
4.3.1 Implementasi Strategi (<i>Strategy Implementation</i>)	96
4.4 Pembahasan.....	117

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017	2
1.2	Data Pengemis Menurut Kab/Kota Provinsi Banten	4
1.3	Rekap Data Hasil Operasi Razia PMKS Gelandangan dan Pengemis Tahun 2017	7
1.4	Rekap Data Hasil Operasi Razia PMKS Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018	8
3.1	Pedoman Wawancara	67
3.2	Informan Penelitian	73
3.3	Jadwal dan Waktu Penelitian	80
4.1	Informan Penelitian	92
4.2	Matriks Triangulasi Sumber	95
4.3	Jumlah Anggaran untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	108

DAFTAR GAMBAR

1.1	Seseorang sedang memberi uang kepada Pengemis di jalan bawah flyover di Kota Tangerang.....	10
2.1	<i>Strategy Management</i> menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 1996:31.....	35
2.2	Segitiga Strategi Menurut Tunggal Amin Widjaja (2004).....	36
2.3	Alur Manajemen Strategi	41
2.4	Kerangka Berpikir	58
3.1	Bagan Interaktif Teknik Analisis Data menurut Miles dan Hubberman	74
4.1	Peta Administratif Kota Tangerang	83
4.2	Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang.....	84
4.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang	87
4.4	Tempat Tinggal gepeng di PSBK Pangudi Luhur Bekasi.....	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Keterangan Informan

Lampiran 3 Member Check

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Kategorisasi Data

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan undang-undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan kondisi masyarakat menjadi perhatian yang sangat penting.

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki hak yang sama, dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan, kesehatan dan hak perlindungan. Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dalam hal pertumbuhan penduduk di dunia, dimana hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyak masalah yang harus dihadapi.

Beberapa masalah yang harus dihadapi antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong

penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dan masalah yang terjadi di kota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial yang ada. Sehingga timbulnya banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di setiap provinsi di Indonesia.

Setiap Provinsi di Indonesia tidak lepas dari permasalahan sosial seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), contoh seperti di Provinsi DKI Jakarta yang perkembangannya sangat pesat sehingga bukan hanya warga asli Jakarta saja yang menjadi PMKS tetapi juga dari daerah-daerah lainnya. Permasalahan ini juga dirasakan Provinsi Banten dimana jumlah PMKSnya cukup banyak. Adapun data jumlah PMKS di Provinsi Banten pada tahun 2017.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinas Sosial Provinsi Banten 2017

No.	Jenis PMKS	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Tangga Miskin (RTM)	654,785	KK
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	57,048	Jiwa
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1,915	KK
4	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	5,318	KK
5	Anak Balita Terlantar	15,636	Jiwa

6	Anak Terlantar	83,133	Jiwa
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	447	Jiwa
8	Anak Berhadapan dengan Hukum	262	Jiwa
9	Anak Jalanan	521	Jiwa
10	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	5,495	Jiwa
11	Anak yang menjadi KTK/ Diperlakukan Salah	57	Jiwa
12	Lanjut Usia Terlantar	71,746	Jiwa
13	Gelandangan	342	Jiwa
14	Pengemis	648	Jiwa
15	Pemulung	5,990	Jiwa
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	1,028	Jiwa
17	Korban Penyalahgunaan Napza	539	Jiwa
18	Tuna Susila	380	Jiwa
19	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	151	Jiwa
20	Kelompok Minoritas	152	Jiwa
21	Penyandang Disabilitas	29,750	Jiwa
22	Korban Tindak Kekerasan	467	Jiwa
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1,377	Jiwa
24	Korban Trafficking	31	Jiwa
25	Korban Bencana Alam	82,262	Jiwa
26	Korban Bencana Sosial	987	Jiwa

(Sumber : Pemuktahiran Data PMKS PSKS Dinas Sosial Prov. Banten 2017)

Dari data jumlah PMKS di Provinsi Banten bisa dilihat bahwa rata rata jumlahnya lebih dari 200 jiwa dari setiap kategori jenis PMKS. Hal tersebut harus diminimalisir bahkan harus diselesaikan agar tidak bertambahnya lagi untuk tahun berikutnya. Berdasarkan penelitian ini peneliti memfokuskan lebih kepada pengemis yang ada, untuk itu dapat dilihat jumlah pengemis pada tahun 2017 di provinsi banten sekitar 648 jiwa. Bila dilihat jumlahnya angka tersebut sudah melebihi 500 jiwa di tahun 2017.

Provinsi Banten sendiri mempunyai 8 Kabupaten dan Kota, diantaranya Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota

Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangsel. Adapun data jumlah pengemis Provinsi Banten tahun 2016 dan 2017 berdasarkan kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pengemis Menurut Kab/Kota Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemis					
		2016		Jumlah	2017		Jumlah
		(L)	(P)		(L)	(P)	
1	Kab. Pandeglang	82	40	122	37	6	43
2	Kab. Lebak	31	42	73	24	29	53
3	Kab. Tangerang	47	32	79	67	87	154
4	Kab. Serang	134	69	203	54	24	78
5	Kota Tangerang	18	14	32	77	40	117
6	Kota Cilegon	16	7	23	12	8	20
7	Kota Serang	96	40	136	98	63	161
8	Kota Tangsel	15	13	28	15	7	22
Jumlah		439	257	696	412	243	648

(Sumber : Dinas Sosial Provinsi Banten)

Berdasarkan data diatas bahwa ada 3 Kota atau kabupaten yang meningkat jumlah angka pengemisnya, diantaranya yaitu daerah Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan salah satunya yaitu Kota Tangerang. Untuk di daerah Kota Tangerang sendiri jumlah pengemis meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar 85 jiwa, hal ini bisa menjadi masalah sosial yang terjadi sampai saat ini. Dengan bertambahnya jumlah tersebut pengemis ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah kota, karena masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar, seperti di Kota Tangerang ini yang menjadi penunjang ibukota Jakarta. Sebagai salah satu kota penunjang ibukota Jakarta, Tangerang yang kini mulai dijamahi gedung-gedung bertingkat tinggi, tempat hiburan dan pusat perbelanjaan, menjadi magnet bagi kemunculan pengemis tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengemis berasal dari kata “emis” ditambah awalan “peng” menjadi pengemis, artinya orang yang meminta-minta. Dalam Peraturan Pemerintah, Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mereka ini hidup dengan cara berpindah tempat atau ada juga yang bergelandangan di pinggiran jalan maupun di tempat-tempat yang kumuh sekalipun.

Keberadaan pengemis di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota. Oleh sebab itulah, apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa dampak adanya pengemis yang paling menyita perhatian adalah terganggunya ketertiban lingkungan, meningkatnya tindakan kriminal, bertambahnya angka pengangguran, serta image daerah kota yang terkesan kumuh dan tidak tertata dengan baik. Dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-lain. Hal tersebut sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Kota Tangerang seperti di daerah Tangerang, Karawaci, Cipondoh, maupun di daerah Pinang.

Dilihat dari daerah yang ada di wilayah Kota Tangerang, para Pengemis ini masih banyak berkeliaran seperti di pinggir jalan raya, di bawah flyover, di

perempatan jalan lampu merah, di angkutan umum seperti angkot ataupun bus dan hingga keliling ke perumahan warga sekitar di Kota Tangerang.

Terkait hal tersebut banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk menangani mereka, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum, yang diharapkan dapat membuat jera para pengemis karena tidak ada yang memberi dan juga dengan pembagian makanan untuk keluarga miskin, sampai dengan operasi penggarukan, yaitu metode pengangkutan dan pemindahan paksa para pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Pada kenyataannya, upaya-upaya tersebut kurang efektif dan bahkan dinilai tidak mampu mengendalikan laju pengemis yang tiap tahun semakin menjamur.

Untuk mengatasi pengemis, pemerintah Kota Tangerang mengutus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merazia semua pengemis yang ada diseluruh sudut Kota Tangerang, untuk kemudian dijaring dan ditampung oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kota dari pengemis, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada mereka.

Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri terus melakukan upaya untuk mengatasi masalah pengemis bersama dengan pihak pihak yang terkait dengan melakukan operasi razia secara rutin. Ada sebuah rekap data dari hasil operasi razia PMKS pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dari tahun 2017 sampai tahun 2018, berikut adalah hasil rekap datanya :

Tabel 1.3**Rekap Data Hasil Operasi Razia PMKS Pengemis Tahun 2017**

No.	Rentang Umur	Tanggal Operasi	Jumlah (Orang)
1.	16 - 68 Tahun	28 Januari 2017	16 Orang
2.	14 - 60 Tahun	17 Februari 2017	4 Orang
3.	19 - 70 Tahun	24 Februari 2017	5 Orang
4.	18 - 71 Tahun	31 Maret 2017	9 Orang
5.	9 - 71 Tahun	13 April 2017	13 Orang
6.	29 - 45 Tahun	22 April 2017	2 Orang
7.	18 - 23 Tahun	11 Mei 2017	7 Orang
8.	1 - 56 Tahun	12 Mei 2017	15 Orang
9.	14 - 64 Tahun	18 Mei 2017	10 Orang
10.	4 - 70 Tahun	24 Mei 2017	8 Orang
11.	2,5 - 64 Tahun	17 Juni 2017	12 Orang
12.	9 - 62 Tahun	18 Agustus 2017	8 Orang
13.	11 - 28 Tahun	21 Agustus 2017	16 Orang
14.	20 - 70 Tahun	9 September 2017	9 Orang
15.	3 - 65 Tahun	16 September 2017	14 Orang
16.	15 - 40 Tahun	28 September 2017	8 Orang
17.	15 - 60 Tahun	13 Oktober 2017	10 Orang
18.	16 - 33 Tahun	22 Oktober 2017	10 Orang
19.	13 - 60 Tahun	17 November 2017	10 Orang
20.	19 - 80 Tahun	13 Desember 2017	10 Orang
21.	10 - 52 Tahun	15 Desember 2017	4 Orang
22.	17 - 29 Tahun	19 Desember 2017	4 Orang
23.	19 - 25 Tahun	20 Desember 2017	4 Orang

(Sumber : Dinas Sosial Kota Tangerang Tahun 2017)

Berdasarkan dari data di atas bahwa Dinas Sosial telah melakukan razia pengemis selama 23 kali dalam setahun di seluruh daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 lalu. Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri hanya memperkirakan saja jumlah orang yang tertangkap tersebut, hal ini dikarenakan bahwa adanya pengemis yang sudah pernah tertangkap razia sebelumnya dan mereka tertangkap kembali pada saat razia dilakukan, oleh karena itu tidak dapat dipastikan jumlah total yang sebenarnya berapa. Rata rata ada 10 orang yang berhasil tertangkap setiap melakukan operasi razia.

Tabel 1.4
Rekap Data Hasil Operasi Razia PMKS Pengemis Tahun 2018

No.	Rentang Umur	Tanggal Operasi	Jumlah (Orang)
1.	10 - 62 Tahun	13 Januari 2018	13 Orang
2.	6 - 70 Tahun	17 Januari 2018	8 Orang
3.	12 - 72 Tahun	20 Januari 2018	18 Orang
4.	7 - 39 Tahun	1 Februari 2018	15 Orang
5.	16 - 60 Tahun	3 Februari 2018	20 Orang
6.	14 - 41 Tahun	6 Februari 2018	12 Orang
7.	2 - 74 Tahun	21 Februari 2018	7 Orang
8.	18 - 63 Tahun	6 Maret 2018	9 Orang
9.	18 - 25 Tahun	7 Maret 2018	7 Orang
10.	2 - 36 Tahun	14 Maret 2018	11 Orang
11.	19 - 65 Tahun	23 Maret 2018	4 Orang
12.	22 - 71 Tahun	27 Maret 2018	6 Orang
13.	7 - 60 Tahun	11 April 2018	14 Orang
14.	17 - 40 Tahun	12 April 2018	5 Orang
15.	15 - 33 Tahun	19 April 2018	8 Orang
16.	5 - 56 Tahun	20 April 2018	9 Orang
17.	15 - 70 Tahun	21 April 2018	8 Orang
18.	14 - 80 Tahun	2 Mei 2018	14 Orang
19.	3 - 80 Tahun	5 Mei 2018	9 Orang
20.	12 - 41 Tahun	10 Mei 2018	8 Orang
21.	7 - 91 Tahun	13 Mei 2018	6 Orang
22.	2 - 74 Tahun	20 Mei 2018	6 Orang
23.	20 - 50 Tahun	21 Mei 2018	10 Orang
24.	19 - 54 Tahun	22 Mei 2018	9 Orang
25.	15 - 73 Tahun	31 Mei 2018	8 Orang
26.	1 - 67 Tahun	2 Juni 2018	11 Orang
27.	2 - 55 Tahun	6 Juni 2018	8 Orang
28.	23 - 65 Tahun	8 Juni 2018	6 Orang
29.	3 - 57 Tahun	9 Juni 2018	8 Orang
30.	1 - 38 Tahun	13 Juni 2018	10 Orang
31.	2 - 73 Tahun	14 Juni 2018	11 Orang

(Sumber : Dinas Sosial Kota Tangerang Tahun 2018)

Berdasarkan dari data di atas bahwa Dinas Sosial telah melakukan razia pengemis selama 31 kali dalam setahun di seluruh daerah Kota Tangerang pada tahun 2018 lalu. Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri hanya memperkirakan saja jumlah orang yang tertangkap tersebut, hal ini dikarenakan bahwa adanya

pengemis yang sudah pernah tertangkap razia sebelumnya dan mereka tertangkap kembali pada saat razia dilakukan, oleh karena itu tidak dapat dipastikan jumlah total yang sebenarnya berapa.

Berdasarkan dari kedua data tabel 1.3 dan tabel 1.4 dijelaskan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2018 ada beberapa pengemis yang berada di Kota Tangerang berasal dari daerah lain. Hingga November 2017, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang sudah membina 200 orang pengemis yang terjaring razia. Pengemis berjenis kelamin laki-laki paling banyak dijumpai saat razia. Mayoritas pengemis yang terazia pun masih tercatat dalam usia produktif, yakni 15 - 55 tahun. Lalu para pengemis tersebut di kirim oleh Dinas Sosial Kota Tangerang ke panti rehabilitasi sosial yang ada di Bekasi untuk menjalani pembinaan. Pemerintah Kota Tangerang sendiri mengkhawatirkan soal pengiriman pengemis ketika selesai melakukan pembinaan dari Panti Rehabilitasi Sosial di Bekasi, mereka akan kembali lagi ke Kota Tangerang atau berpindah tempat. Sedangkan beberapa pengemis yang berasal dari daerah terdekat dengan Kota Tangerang akan dipulangkan segera setelah mendapat pelatihan di Rumah Singgah. (Hasil Wawancara dengan Bpk. Iing Riskomar sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Tangerang pada tanggal 26 November 2017).

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal yang dilakukan oleh peneliti selama ini terdapat berbagai permasalahan permasalahan sebagai berikut :

Pertama, yaitu kurangnya penegakan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni mengenai pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Tangerang yang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Iing Riskomar sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Kota Tangerang yang mengatakan bahwa, “Kita sebagai warga masyarakat Kota Tangerang harus menegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Tangerang, dengan bersama pihak Dinas Sosial dan pihak pihak yang terkait dan masyarakat seluruh Kota Tangerang tidak boleh memberi para pengemis berupa uang maupun barang agar mereka para pengemis tidak ada lagi di Kota Tangerang.” (Pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Pukul 14:15 di Dinas Sosial Kota Tangerang). Sebagai contoh yang menggambarkan bahwa masyarakat Kota Tangerang masih memberikan uang kepada pengemis di Jalanan.



Gambar 1.1 Seseorang sedang memberi uang kepada pengemis di jalan bawah *flyover* di Kota Tangerang

Dilihat dari gambar 1.1 menyimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada seorang pengemis di jalanan. Hal ini menjadi suatu masalah yang harus dibenahi oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal tersebut membuat kurangnya partisipasi masyarakat untuk mencegah dan mengurangi keberadaan pengemis dengan masih memberikan uang pada pengemis. Dalam hal ini peran masyarakat harus dilibatkan dalam menangani masalah pengemis ini. Dikarenakan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Tangerang dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar dapat terlaksananya peraturan daerah tersebut. Dengan begitu diharapkan para pengemis yang ada di Kota Tangerang menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali.

Oleh karena itu yang diharapkan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri agar dapat bisa terwujudnya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 dapat terlaksana dengan baik. Isi dari Peraturan Daerah tersebut yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.
- 2) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial

atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.

Kedua, yaitu para pengemis yang ada di Kota Tangerang selalu kembali datang untuk mengemis walaupun sudah direhabilitasi sosial dan mayoritas pengemis tersebut berasal dari luar Kota Tangerang.. Hal ini pun diperkuat oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang mengatakan bahwa masalah pengemis ini memang terbilang sulit diatasi, ini dikarenakan pada saat Dinas Sosial sudah melakukan razia dan memberikan pelatihan kepada mereka, para pengemis tersebut masih ada saja yang kembali lagi untuk melakukan ngemis dan yang kembali tersebut adalah pengemis yang sama yang sudah pernah dirazia sebelumnya dan ada juga yang pendatang baru dari luar kota maupun dari dalam kota. Para pengemis itu memang hidupnya dijalan dan mencari uang di sana. (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018).

Berdasarkan informasi dari media Online, dikutip dari (media online) *Palapa News 1 April 2017*, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Agus Sudrajat pada jumat (1/4/2017) mengatakan, bahwa :

“Razia rutin dilakukan. Tapi, mereka (pengemis) yang tertangkap dan dibina, balik lagi ke jalanan untuk mengemis. Menariknya, setiap kami razia mayoritas pengemis memang bukan berasal dari dalam kota melainkan dari luar kota.” (Di Dinas Sosial Kota Tangerang, 22 April 2017)

Berdasarkan mengenai informasi di atas bahwa para pengemis tersebut turun lagi ke jalan untuk kembali mengemis agar mendapatkan uang walaupun sudah

tertangkap razia dan menjalani masa rehabilitasi sosial dan mayoritas dari pengemis tersebut berasal dari luar Kota Tangerang.

Ketiga, yaitu kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib terhadap pengemis yang ada di Kota Tangerang seperti Dinas Sosial dan Satpol PP harus terus melakukan pengamatan di setiap tempat dimana para pengemis tersebut beraktivitas. Dalam arti para pengemis yang ada di Kota Tangerang harus terus di perhatikan setiap harinya agar mereka pun terus diawasi oleh para petugas yang melakukan operasi razia sehingga pengemis pun jadi takut dan tidak melakukannya kembali.

Keempat, yaitu Dinas Sosial masih belum punya Panti Rehabilitasi Sosial yang khusus untuk membina dan menempatkan gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring operasi. Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bpk. Agus Sudrajat, yang menyatakan bahwa, sebenarnya tahun 2017 lalu pihaknya sudah menyediakan pagu anggaran untuk pembangunan panti rehabilitasi sosial. Namun anggaran itu tidak terserap karena kesulitan mencari lahan. Dinas Sosial memang sangat membutuhkan Panti Rehabilitasi Sosial untuk menangani PMKS yang ada di Kota Tangerang. Kalau yang sekarang setelah menerima hasil operasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan langsung dikirim ke Bekasi. (Selasa 7 Maret 2017, Pukul 13.15 WIB di Dinas Sosial Kota Tangerang).

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan dalam observasi awal, Dinas Sosial belum bisa menjawab persoalan-persoalan seperti

pengemis yang harus diatasi agar dapat terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan bersih serta menciptakan motto Kota Tangerang yang Berakhlakul Karimah sebagai kota yang dilandaskan keagamaan agar tidak adanya lagi keresahan masyarakat dari masalah pengemis yang ada di Kota Tangerang ini. Perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, pihak Satpol PP dan pihak yang berwajib lainnya untuk lebih tegas dan intensif, agar nantinya para pengemis merasakan suatu perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik lagi dalam hal penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 di Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Keberadaan para pengemis di Kota Tangerang merupakan suatu hal yang negatif bagi masyarakat. Jika dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada tersebut, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.

2. Para Pengemis yang ada di Kota Tangerang selalu kembali datang untuk mengemis walaupun sudah direhabilitasi sosial dan mayoritas pengemis tersebut berasal dari luar Kota Tangerang.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib terhadap pengemis yang ada di Kota Tangerang seperti Dinas Sosial dan Satpol PP harus terus melakukan pengamatan di setiap tempat dimana para pengemis tersebut beraktivitas.
4. Dinas Sosial masih belum punya Panti Rehabilitasi Sosial sendiri yang khusus untuk membina dan menempatkan gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring operasi.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang dan identifikasi masalah dan karena peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, peneliti coba membatasi penelitiannya yakni mengenai Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan di atas mengenai Implementasi Strategi dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang maka perumusan masalahnya yaitu : Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian, yaitu pertama, manfaat teoritis penelitian, kedua manfaat praktis penelitian, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi ilmu administrasi publik baik dari organisasi publik dan non publik sehingga dapat memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan disiplin ilmu sosial, yang dapat memberikan kontribusi positif di bidang pendidikan, riset dan teknologi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bisa bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan yang luas terkait masalah yang diteliti dan dapat mendeskripsikan temuan dan fakta di lapangan dengan pemikiran teoritis dari peneliti sendiri.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi dan masukan dalam memberikan sebuah evaluasi terhadap Implementasi Strategi Dinas Sosial ini. Dan nantinya diharapkan Implementasi Strategi Dinas Sosial ini akan semakin membaik.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan bahan referensi dalam penulisan tugas, makalah atau bahan penelitian selanjutnya. Dan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mahasiswa itu sendiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan

kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.

1.2 Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.

1.3 Rumusan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR

2.1 Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

2.3 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

3.3 Informan Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual.

3.5 Teknik Analisis Data

Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data.

3.6 Uji Keabsahan Data

Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektivitas dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif

berasal dari unsur subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.

3.7 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai penelitian.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang tahapan waktu selama proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4.2 Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data dan wawancara narasumber.

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

4.2 Saran

Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan seperti Lampiran tabel-tabel, Lampiran grafik, Instrumen penelitian, Riwayat hidup peneliti, dll.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Penggunaan teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah masalah yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini, peneliti mengkaji beberapa teori yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.

Penelitian mengenai Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang akan dikaji dengan menggunakan teori-teori dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik, yaitu teori Manajemen Strategi, teori Implementasi, jurnal penelitian dan sumber lain sebagainya guna menguatkan dasar empiris pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu, dalam bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola sumber

daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk memperingankan pekerjaan. Penelitian ini berkenaan dengan Manajemen Strategi, khususnya dari aspek Implementasi Strategi oleh karena itu teori-teori utama yang akan dijadikan landasan adalah teori Manajemen Strategi.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Dalam pengertian manajemen sebagai seni karna seni berfungsi dalam mengujudkan tujuan yang nyata dengan hasil atau manfaat sedangkan manajemen sebagai ilmu yang berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian sehingga memberikan penjelasan yang sebenarnya.

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai

dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur."

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti "mengendalikan," terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*.

Manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu "*Manage*" yang berarti, mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. Sedangkan Pengertian Manajemen secara etimologis adalah seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian manajemen juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan organisasi dalam upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Orang yang melakukan manajemen disebut dengan manajer.

Ada 6 macam teori manajemen diantaranya :

- a. Aliran klasik: Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut.

- b. Aliran perilaku: Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia.
- c. Aliran manajemen Ilmiah: aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen.
- d. Aliran analisis sistem: Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya.
- e. Aliran manajemen berdasarkan hasil: Aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan.
- f. Aliran manajemen mutu: Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai

tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu :

- a. Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang

harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

- c. Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu *men, money, materials, machines, method, dan markets*.

Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur

dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman

maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari :

- a. Pembagian kerja (*division of work*)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
- c. Disiplin (*discipline*)
- d. Kesatuan perintah (*unity of command*)
- e. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*)
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri (*subordination of individual interests to the general interests*)
- g. Pembayaran upah yang adil (*remuneration*)
- h. Pemusatan (*centralisation*)
- i. Hierarki (*hierarchy*)

- j. Tata tertib (*order*)
- k. Keadilan (*equity*)
- l. Stabilitas kondisi karyawan (*stability of tenure of personnel*)
- m. Inisiatif (*Inisiative*)
- n. Semangat kesatuan (*esprits de corps*)

2.1.2 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen pengertian manajemen strategi dikemukakan bahwa :

“Strategic Management is that a set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation”

Jika diterjemahkan secara bebas maka Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Dari pengertian manajemen strategi di atas yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula. Dari pengertian manajemen strategi di atas yang cukup luas tersebut

menunjukkan bahwa manajemen stratejik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula.

Alfred Chandler mengatakan bahwa strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dalam kajiannya tentang strategi, Henry Mintzberg mencatat bahwa setidaknya strategi tidak sekadar memiliki dua elemen definisi, yaitu sebagai perencanaan (*plan*) dan pola (*pattern*). Lebih dalam lagi, ia mengungkap bahwa definisi strategi telah berkembang dengan tiga 'P' baru, yaitu posisi (*position*), perspektif (*perspective*), dan penerapan (*ploy*) (Mintzberg, 1994 dan Mintzberg, Ahlstrand, dan Lampel, 1998).

Kajian tentang manajemen strategi yang terus berkembang selalu diarahkan untuk menghasilkan berbagai pendekatan yang memudahkan organisasi untuk melakukan penyesuaian strategi yang dipilihnya dalam kerangka menjamin keberhasilan usahanya. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis, bagaimanapun juga organisasi harus sanggup secara konstan menghadapi perubahan yang demikian cepat. Formulasi strategi harus berupa proses kognitif dibanding proses konsepsi semata. Dalam kerangka inilah

pembelajaran organisasi menjadi fokus perhatian utama riset dan kemampuan belajar diakui sebagai satu-satunya sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*).

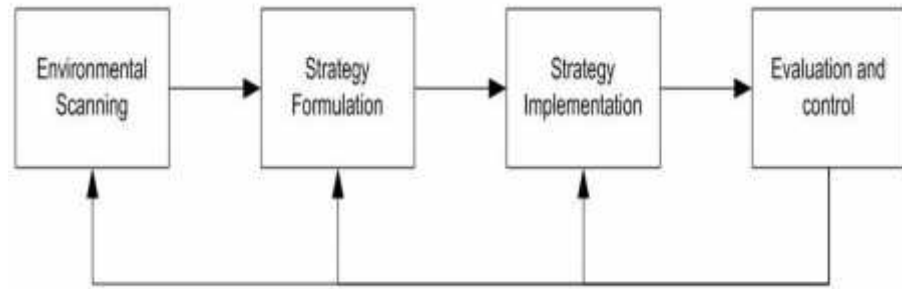
Merangkum seluruh paparan di atas, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, dan Joseph Lampel mengidentifikasi bahwa formulasi strategi dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh aliran pemikiran dan tiga kelompok pemikiran. Kesepuluh aliran tersebut adalah: *Design, Planning, Positioning, Entrepreneurial, Cognitive, Learning, Power, Cultural, Environmental*, dan *Configuration*. Tiga aliran pertama masuk ke dalam kelompok Preskriptif yang lebih menekankan pada proses penyusunan strategi; enam aliran berikutnya masuk dalam kelompok Deskriptif yang menekankan pada bagaimana strategi dilakukan; dan aliran terakhir identik dengan kelompok ketiga, yaitu Konfigurasi yang mengkombinasikan/ mengintegrasikan aliran-aliran sebelumnya. (Mintzberg, Ahlstrand, dan Lampel, 1998).

Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Manajemen Strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Renstra dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Penetapan renstra dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 9), proses Manajemen Strategi meliputi 4 elemen dasar, yaitu :

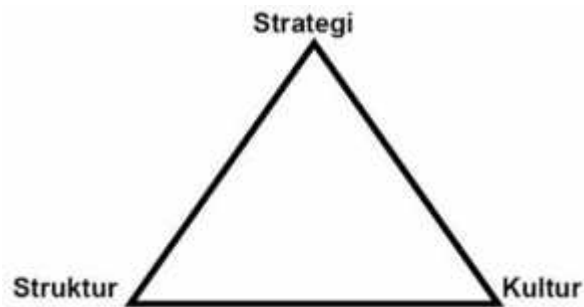
- a. Pengamatan Lingkungan
- b. Perumusan Strategi
- c. Implementasi Strategi
- d. Evaluasi dan Pengendalian



Gambar 2.1 *Strategy Management* menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 1996:31

Salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan secara terus-menerus oleh para ahli strategi adalah segitiga strategi-struktur-kultur. Dalam segitiga ini hubungan ketiga elemen tersebut harus dapat dikelola sedemikian rupa agar menjadi seimbang antara satu dengan lainnya. Ketimpangan hubungan tersebut akan bermuara pada tumpulnya strategi yang dibangun.

Strategi mengkaji tentang gerak langkah yang akan diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Kajian tentang struktur memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi beserta berbagai unsur lainnya yang terkait. Sedangkan kajian atas kultur memusatkan perhatian pada persoalan manajemen sumber daya manusia, manajemen perubahan, kultur organisasi, dan berbagai unsur lainnya yang terkait.



Gambar 2.2 Segitiga Strategi

Menurut Tunggal Amin Widjaja (2004), manajemen strategis terdiri dari sembilan tugas kritical berikut ini :

1. Memformulasi misi (*mission*) perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud (*purpose*), falsafah (*philosophy*) dan sasaran (*goal*).
2. Mengembangkan suatu profil perusahaan yang merefleksi pada kondisi internal dan kemampuannya.
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk baik faktor kompetitif maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum.
4. Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya.
5. Mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari sudut misi perusahaan.
6. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total (*grand strategies*) yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan.
7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan (*grand strategies*).
8. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan yaitu memadani tugas – tugas, manusia, struktur, teknologi dan menekankan sistem ganjaran.
9. Menilai keberhasilan proses strategik sebagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses manajemen strategi yaitu :

A. Faktor Internal

- a. Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan.
- b. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang diberikan oleh anggota organisasi.
- c. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi.

Analisis internal adalah proses dimana perencana strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan produksi dan operasi, sumberdaya dan karyawan perusahaan serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana letak kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) perusahaan.

David Hunger. J & Thomas L. Wheelen (1996:13) dalam bukunya membagi beberapa faktor kekuatan atau kelemahan internal kunci yang nantinya mempengaruhi dasar analisis internal :

- a. Visi, misi, strategi dan kebijakan perusahaan.
- b. Budaya Perusahaan (harapan, nilai-nilai organisasi).
- c. Orientasi perusahaan saat ini.
- d. Struktur organisasi (komunikasi, wewenang dan arus kerja).
- e. Pengalaman.
- f. SDM manajemen puncak dan karyawan.

- g. Hubungan karyawan.
- h. Penelitian dan pengembangan (aplikasi dan pemanfaatan teknologi).
- i. Posisi finansial (modal, pembiayaan dan hutang).
- j. Fasilitas pemanufakturan.
- k. Saluran distribusi.

B. Faktor Eksternal

Jauch dan Glack (Tahun 1999) mendefinisikan analisis eksternal sebagai suatu proses yang dilakukan oleh perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) bagi perusahaan.

- a. Lingkungan mikro atau lingkungan luar dekat atau tugas.
- b. Lingkungan makro atau lingkungan luar jauh.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 300), dalam tahap implementasi strategi, manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Fred R. David (2004) membagi manfaat ini kedalam dua manfaat, yaitu manfaat finansial, dan manfaat non finansial. Sedangkan Greenley menyatakan manajemen strategis memberikan manfaat berikut ini :

- a. Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang.
- b. Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen.
- c. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik.

- d. Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek.
- e. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- g. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana.
- h. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf.
- i. Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam usaha bersama.
- j. Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggungjawab individu.
- k. Mendorong pemikiran ke masa depan.
- l. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang.
- m. Mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan.
- n. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu bisnis.

Pada prinsipnya, manajemen strategik terdiri atas tiga tahapan, yaitu :

A. Tahap Formulasi

Meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Dalam hal penyusunan strategi, Fred R. David membagi proses ke dalam tiga tahapan aktivitas, yaitu: input stage, matching stage, dan decision stage. Termasuk di dalam formulasi strategi adalah pembahasan tentang bisnis baru yang akan dimasuki, bisnis yang dihentikan, alokasi

sumber-sumber yang dimiliki, apakah akan melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk joint-venture, serta bagaimana untuk menghindari pengambilalihan secara paksa (*hostile takeover*).

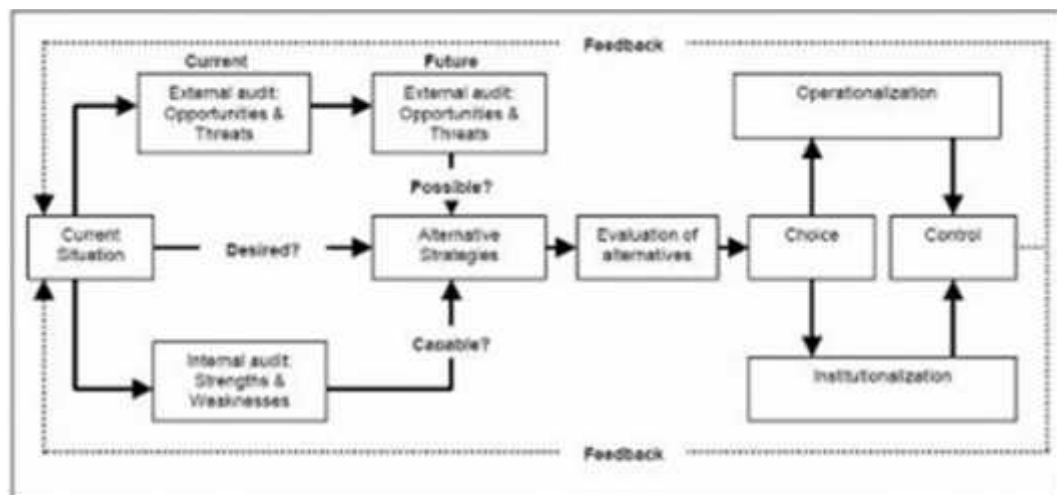
B. Tahap Implementasi

Meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Pada tahap ini, ketrampilan interpersonal sangatlah berperan. Sebagaimana Carl von Clausewitz (1780-1831) dalam bukunya yang diterbitkan kembali *On War*, strategi bukanlah sekedar aktivitas *problem-solving*, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (*open-ended*) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model chain of command di mana suatu strategi harus dijalankan setepat mungkin (menghindari bias-bias yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur organisasi).

C. Tahap Evaluasi

Meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah:

- Menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan.
- Pengukuran kinerja.
- Pengambilan tindakan perbaikan.



Gambar 2.3 Alur Manajemen Strategi

Terlepas dari pendekatan perencanaan yang digunakan, formulasi strategi harus berlandaskan pada pemahaman secara mendalam pada

pasar, kompetisi, dan lingkungan eksternal. Strategi hadir dalam berbagai bentuk. Namun demikian, strategi akan mengidentifikasi tipe-tipe barang dan jasa yang akan dijual, sumber-sumber dan teknologi yang digunakan dalam proses produksinya, metoda koordinasi usaha-usaha dan rencana-rencana untuk digunakan untuk menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif, serta tipe-tipe aktivitas yang diambil. Richard P. Rumelt mengidentifikasi empat tolok ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi, yaitu (Rumelt, 1997) :

1. *Consistency* : strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
2. *Consonance* : strategi harus merepresentasikan respons adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi.
3. *Advantage* : strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu (terpilih).
4. *Feasibility* : strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan (di luar kemampuan) dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan.

Adapun beberapa Prinsip Manajemen Strategi dibagi menjadi sebagai berikut :

- A. Perencanaan Strategi Merembes (menembus), seluruh manajer diberbagai divisi harus belajar untuk berfikir secara strategis, seluruh tingkat manajerial akan terlibat didalam manajemen strategi dengan berbagai cara tertentu. Tiap pola dan cara yang akan dipakai berbeda namun masih mengarah pada sasaran yang sama, tujuan yang ditetapkan.
- B. Perencanaan Komprehensif, maksudnya adalah perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan serta pengembangan bisnis, tidak dibuat dengan asal asalan.

Ada beberapa komponen dalam proses manajemen strategi, diantaranya :

- a. Misi Organisasi (perusahaan), merupakan gambaran tujuan tentang keberadaan perusahaan. misi ini meliputi tipe, ruang lingkup serta karakteristik tindakan yang akan dijalankan.
- b. Tujuan, tujuan merupakan hasil akhir dari sebuah kegiatan. disini akan ditegaskan hal apa yang akan digapai, kapan waktunya, dan berapa yang harusnya dicapai.
- c. Strategi, merupakan suatu keterampilan atau ilmu dalam memenangkan sebuah persaingan. Persaingan adalah perebutan konsumen (pangsa pasar) dan konsumen setiap saat akan mengalami perubahan, maka strategi hendaknya dikelola dengan sedemikian rupa supaya tujuan perusahaan bisa tercapai.

- d. Kebijakan, kebijakan merupakan cara dalam mencapai sasaran perusahaan. kebijakan mencakup garis pedoman, aturan-aturan dan prosedur untuk menyokong usaha pencapaian sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan.
- e. Profil Perusahaan, menggambarkan kondisi perusahaan baik itu keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya fisik lainnya.
- f. Lingkungan Eksternal, merupakan seluruh kekuatan yang akan memberikan pengaruh terhadap pilihan strategi serta mendefinisikan kondisi kompetisinya.
- g. Lingkungan Internal, lingkungan internal mencakup seluruh unsur bisnis yang terdapat pada perusahaan.
- h. Analisa Strategi dan Pilihan, hal ini ditujukan kepada keputusan dalam investasi untuk masa mendatang.
- i. Strategi Unggulan, merupakan rencana umum serta komperhensif atas semua aktivitas utama yang ditujukan pada usaha pencapaian sasaran dalam lingkungan yang bersifat dinamis.
- j. Strategi Fungsional, adalah penjabaran strategi umum yang nantinya dijalankan oleh divisi.

Andrew Campbell dan Marcus Alexander mengidentifikasi sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan mengapa suatu strategi dapat gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dan

tujuannya. Ketiga hal tersebut adalah (Campbell dan Alexander, 1997)

:

- a. Strategi Tanpa Arah (*Directionless Strategies*) : kegagalan membedakan antara purposes (apa yang akan dilakukan organisasi) dan constraints (apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan). Perusahaan yang gagal memahami constraints yang dimilikinya dan salah membacanya sebagai maksud purposes, akan cenderung terlempar dari arena bisnis.
- b. Kelumpuhan Perencanaan (*Planning Paralysis*) : kegagalan menentukan pijakan awal untuk bergerak (dari strategi atau tujuan?) menyebabkan terjadinya rencana yang ‘lumpuh’ akibat kebingungan terhadap pelibatan ‘proses’ dalam penyusunan suatu strategi. Menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategi untuk mencapainya atautkah meniru strategi yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat/ingin dicapai berdasarkan strategi tersebut.
- c. Terlalu Fokus pada Proses (*Good Strategy vs Planning Process*) : Seringkali manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar, yaitu:

keuntungan atas dimilikinya maksud (*purposes*) yang stabil dan terartikulasi dengan baik; serta pentingnya penemuan, pemahaman, pendokumentasian, dan eksploitasi informasi-informasi penting (*insights*) tentang bagaimana menciptakan nilai lebih banyak dibanding perusahaan lain.

Bandungkan temuan Campbell dan Alexander tersebut dengan apa yang diungkapkan Henry Mintzberg dalam tulisannya di Harvard Business Review (1994) yang mengungkapkan bahwa perencanaan strategik (*strategic planning*) memiliki suatu potensi kegagalan besar. Kegagalan tersebut adalah keyakinan bahwa analisa akan menuju pada sintesa dan perencanaan strategik adalah pembuatan strategi (*strategy making*). Pada dasarnya, kegagalan ini disebabkan oleh tiga kesalahan mendasar pada asumsi, yaitu (Mintzberg, 1994) :

- a. *Fallacy of Prediction* : tidak setiap hal dapat begitu saja diprediksi, kecuali hal-hal yang memiliki pola berulang (*repetitive pattern*) seperti musim. Sedangkan hal-hal lainnya seperti penemuan teknologi dan peningkatan harga hampir tidak mungkin diduga secara relatif akurat, kecuali oleh para visioner yang biasa membangun strateginya secara personal dan intuitif.
- b. *Fallacy of Detachment* : seringkali manajer dipisahkan dari persoalan detil dan operasional, sesuatu yang seharusnya mereka kenal dengan baik. Ketika manajer terjauhkan dari hal-hal

mendasar tersebut, manajer akan gagal memahami keseluruhan proses dan mengingkari konsep Frederick Taylor tentang manajemen bahwa proses harus sepenuhnya dipahami sebelum diprogram.

- c. *Fallacy of Formalization* : kegagalan perencanaan strategik adalah kegagalan sistem untuk bekerja lebih baik daripada manusia. Sistem formal atau mekanikal seringkali gagal mengimbangi informasi yang berkembang dalam otak manusia. Sistem memang sanggup mengelola informasi yang lebih banyak, tetapi tidak sanggup menginternalisasikan, mencernanya, dan mensintesanya. Formalisasi merujuk pada tata urutan yang rasional, tetapi pembuatan strategi adalah proses pembelajaran yang terus bergerak. Formalisasi akan gagal mencerna sesuatu yang tidak kontinu dan baru. Dan oleh karenanya pemahaman tentang perencanaan strategik (*strategic planning*) harus bisa dibedakan dari pemahaman tentang pembuatan strategi (*strategy making*). Keduanya tidak bisa dianggap sama.

2.1.3 Pengertian Implementasi Strategi

Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui

pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategic. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

2.1.4 Pengertian Pengemis

Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan yaitu :

”Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”

Permasalahan pengemis sebenarnya hanyalah turunan dari permasalahan kemiskinan. Selama persoalan kemiskinan belum teratasi jumlah pengemis tidak akan pernah berkurang malah jumlahnya akan semakin bertambah.

Perilaku mengemis erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan. Semasih adanya kesenjangan ini maka urbanisasi akan sulit dibendung, dan akan memberi peluang munculnya kegiatan sektor informal seperti kegiatan mengemis. Kebijakan penanggulangan pengemis yang dikembangkan adalah dengan lebih memacu pembangunan pedesaan agar serasi dengan pembangunan di daerah perkotaan. Pendekatan yang diperlukan

adalah yang bersifat pendekatan holistik, yang tidak hanya terpaku pada pelaku pengemis itu sendiri tetapi berusaha menjangkau seluruh sub sistem yang mempengaruhi munculnya urbanisasi dan perilaku mengemis, serta termasuk seluruh sumberdaya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang ada di pedesaan diusahakan untuk dikembangkan sebagai subyek pembangunan yang mampu memanfaatkan peluang yang ada serta mengembangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kendala yang dihadapi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 (pasal 2), kebijakan dibidang penanggulangan pengemis merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah, dalam menetapkan kebijakan tersebut Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinasi yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan keputusan presiden. Penertiban pengemis telah diatur dalam Kepres Nomor 40 tahun 1983 Tentang Koordinasi Penanggulangan Pengemis, dalam keputusan bersama antara Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Sosial dengan nomor SKB. 102/MEN/1983 tentang penyelenggaraan Transmigrasi yang dikaitkan dengan penuntasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang

menjadi pemukiman para urban tersebut, sulit dan terbatasnya pekerjaan yang tersedia serta terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan pendidikan menyebabkan mereka banyak mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi pengemis. Kementerian Sosial terus berupaya untuk mengurangi tingkat populasi pengemis, tahun 2011 pemerintah berusaha untuk lebih mengedepankan upaya penanggulangan pokok permasalahan tersebut, di Indonesia terdapat sekitar 30 juta orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang terbagi dalam 22 kelompok, salah satunya adalah pengemis yang jumlahnya sekitar 3 juta jiwa.

Maraknya jumlah pengemis di tengah- tengah kota besar tentu mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya mengemis bukan nasib tapi pilihan mereka. Namun hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi, ketidakkonsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang menaruh perhatian terhadap pengemis.

Menjadi pengemis bukanlah sebuah pilihan hidup namun lebih mengarah kepada tuntutan hidup yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Hal inilah yang terkadang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis.

Pengemis juga memiliki kelompok-kelompok yang membedakan motif-motif pengemis satu sama lain. Kelompok pengemis ini antara lain :

- a. Mengemis karena tidak mampu bekerja karena cacat tubuh;
- b. Mengemis karena malas bekerja;
- c. Pengemis murni yang seluruh penghidupannya dihasilkan dari mengemis;
- d. Pengemis tidak murni yang sebagian penghasilannya didapat dari mengemis;
- e. Pengemis berpengalaman yang lahir dari tradisi dan kebiasaan;
- f. Pengemis kontemporer kontinyu tertutup yang hidup tanpa alternatif pekerjaan lain;
- g. Pengemis kontemporer kontinyu terbuka yang hidup dengan peluang tapi tidak bisa memanfaatkannya;
- h. Pengemis kontemporer temporer yang hanya sementara mengemis dan bergantung pada kondisi musiman;
- i. Pengemis berencana yang menjadikan mengemis sebagai batu loncatan mendapat pekerjaan lain, dan
- j. Pengemis yang diorganisir oleh oknum tertentu.

Ciri-ciri dari kelompok pengemis diatas yang dapat diketahui diantaranya seperti, pakaian yang dikenakan compang camping, kondisi tubuh yang cacat, ada yang memang benar-benar cacat tapi

juga ada yang tidak, biasa mengemis di pinggir jalan raya, trotoar, jembatan, perempatan lampu merah, kawasan pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Selain itu pengemis musiman, akan banyak berdatangan di waktu-waktu tertentu seperti pada waktu bulan Ramadhan dan menjelang hari raya. Pengemis-pengemis tersebut mengemis bukan karena miskin secara ekonomi, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu diantaranya :

- I. pertama, karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali untuk melakukan pekerjaan lain disebabkan cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan.
- II. Kedua, kehilangan rasa malu dan beban moral di depan masyarakat karena sudah merasa enak dan memiliki penghasilan besar dari mengemis.
- III. Ketiga, waktu dimana orang-orang banyak mengeluarkan sedekah seperti di bulan Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri, dan tahun baru, menjadikan mereka merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan.
- IV. Keempat, mengemis karena miskin mental dan malas bekerja. Kelima, pengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat. Dengan dikoordinasi oleh seseorang yang dianggap bos penolong, setiap pengemis “anggota” setia

menyetor hasil mengemisnya kepada sindikat, baik secara harian, mingguan atau bulanan.

Masalah umum pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya pengemis maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengemis tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini walau lokus dan masalahnya tidak sama persis.

Pertama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Nungkei Feriustika Kesumawindayati, Universitas Riau, pada tahun 2014 dengan judul “Strategi Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut berangkat dari latar belakang masalah mengenai proses pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Teori yang digunakan dalam

penelitian tersebut adalah teori Strategi model Mintzberg, dan metode penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa Salah satu pemerintah kota Pekanbaru menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis, melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru memiliki strategi pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu adanya strategi pelaksanaan pembinaan tersebut seharusnya gelandangan dan pengemis yang ada di kota Pekanbaru bisa berkurang. Tetapi kota Pekanbaru masih belum bisa di bilang tertib karena keberadaan gelandangan dan pengemis semakin meningkat dan merajalela di kota Pekanbaru tersebut.

Dalam menangani permasalahan ataupun keterbatasan tersebut dibutuhkan pemecahan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menangani permasalahan peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sehingga menghasilkan kemandirian dalam kehidupan gelandangan dan pengemis. Strategi tersebut merupakan proses yang berkelanjutan secara sistematis dari pembuatan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis pada usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut mengikuti hasilnya sebagai umpan balik untuk peningkatan yang berkelanjutan.

Kedua yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Ade Putra, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014 dengan judul “Peranan Dinas

Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut berangkat dari latar belakang masalah mengenai proses pelaksanaan pembinaannya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori tentang Peranan dan teori Pembinaan, dan metode penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa Peranan Dinas Sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif, karena masih adanya upaya-upaya yang belum terealisasi oleh dinas sosial di kota pekanbaru dalam menangani pembinaan. Faktor yang paling utama dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu anggaran operasional yang kurang mencukupi untuk pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis, serta panti sosial yang belum ada untuk pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis tidak dapat direhabilitasi maka sulit diberikan pembinaan.

Ketiga yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Puspita W, Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2013 dengan judul “Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis”. Penelitian tersebut berangkat dari latar belakang masalah mengenai proses pelaksanaannya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Strategi, dan metode penelitiannya yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial DIY dalam menangani

gepeng. Subyek penelitian adalah pegawai Dinas Sosial DIY dan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) serta gepeng. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi Dinas Sosial DIY dilakukan melalui suatu perencanaan strategis. Strategi Dinas Sosial DIY dalam menangani gepeng yakni peningkatan kapabilitas manajemen aparatur, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan keberdayaan gepeng, peningkatan jejaring kemitraan, serta pemantapan upaya berkelanjutan. Kekurangannya yaitu profesionalisme SDM masih kurang, belum berorientasi pada partisipasi masyarakat, pemberdayaan gepeng masih cenderung berorientasi jangka pendek, terlalu fokus pada pemberdayaan dan belum berorientasi pada upaya penyadaran fungsi-fungsi sosial gepeng di masyarakat. Solusi mengatasinya yakni penerapan sistem reward and punishment bagi pegawai, memberikan sanksi tegas terhadap gepeng yang bandel, serta sosialisasi terpadu bersama pihak yang berwenang tentang larangan memberikan sedekah kepada pengemis.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Teori yang digunakan yaitu dari Teori Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 9), proses Manajemen Strategi meliputi 4 elemen dasar, yaitu:

a. Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*)

Pengamatan Lingkungan merupakan suatu hal yang dilakukan guna melihat keadaan dari sisi eksternal maupun internal didalam sebuah masalah yang ingin diamati atau masalah yang ingin diselesaikan.

b. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan instansi.

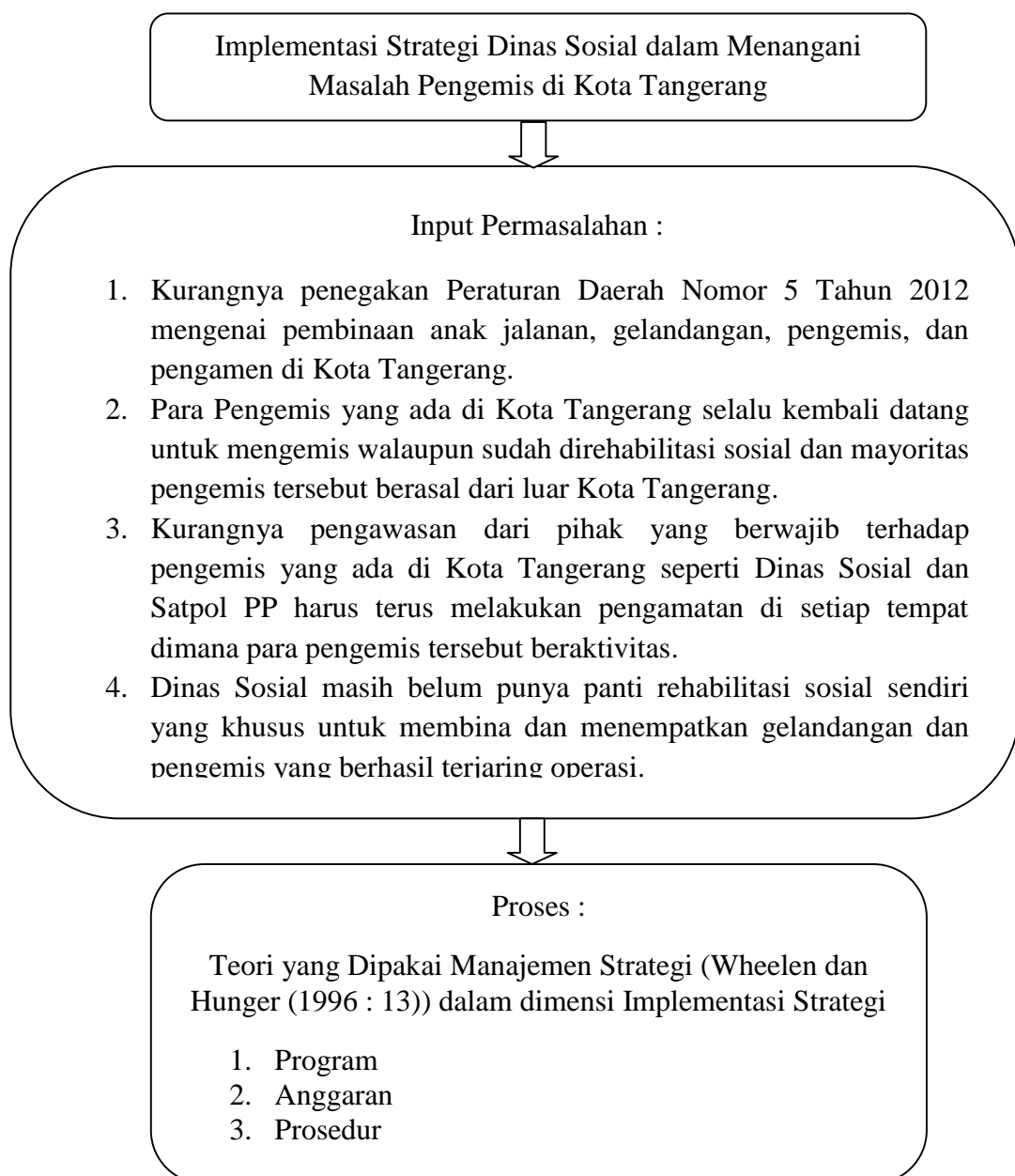
c. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

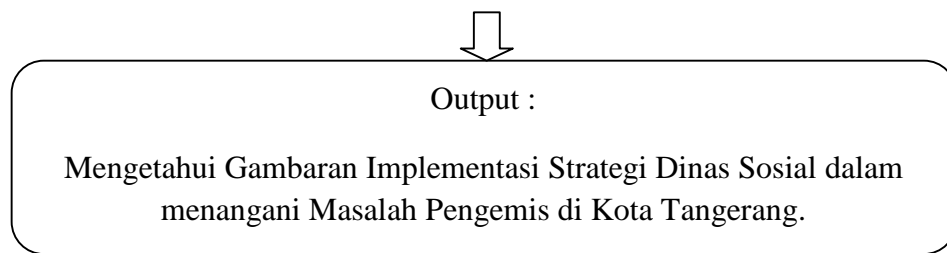
Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

d. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*)

Merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas lembaga, hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para kepala di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

Kerangka berfikir menggambarkan alur pemikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, maka berdasarkan judul penelitian tersebut kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang. Dapat digambarkan kerangka berfikir dari permasalahan yang ada diatas sebagai berikut :





Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang tidak berjalan dengan semestinya sehingga Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mengatasi masalah pengemis hasilnya tidak maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, permasalahan tersebut pun dikaji dengan cara membandingkan permasalahan tersebut dengan teori yang digunakan. Guna mengetahui apakah masalah yang muncul benar-benar sebagai masalah yang bertentangan secara procedural teori, kemudian setelah diketahui masalahnya peneliti mencoba mengkaji kembali masalah tersebut untuk kemudian dicarika solusi yang tepat untuk menghilangkan masalah tersebut.

Setelah masalah tersebut mendapatkan solusi diharapkan dapat memaksimalkan Implementasi Strategi Dinas Sosial Kota Tangerang tersebut

untuk mengatasi masalah pengemis yang ada di Kota Tangerang. Tentunya Implementasi Strategi yang diharapkan sesuai dengan aturan dan teori.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:3). Sedangkan pengertian lainnya menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Dalam konteks penelitian sosial, masalah dalam penelitian, tema dan judul penelitian memiliki perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah - masalah kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Dalam penelitian “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang”, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2011:4) menyatakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha

menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Pada pendekatan ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Selain itu, Bogdan dan Taylor (dalam Meleong, 2007:3) mengemukakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Marshal dalam Sugiyono (2011:13) mendefinisikan kualitatif sebagai proses mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang. Selanjutnya masalah pengemis akan dianalisis menggunakan teori Manajemen Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, yang meliputi 4 dimensi yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui objek serta tujuan, sehingga dapat mempermudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun

yang menjadi lokus dalam penelitian yang berjudul Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang.

Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Tangerang adalah bahwa peneliti sangat tertarik pada permasalahan Pengemis yang terjadi di Kota Tangerang, yang meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur hal itu tetapi masih banyak yang terjadi bahkan boleh dikatakan tidak terpengaruh dari adanya kebijakan yang mengatur hal tersebut. Untuk itu Peneliti tertarik untuk menemukan penyebab permasalahan pada Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 mengenai Pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang serta memberikan resolusi pada kebijakan tersebut agar dapat lebih baik dalam menanggulangi permasalahan Pengemis di Kota Tangerang.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

- a. Manajemen Strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh,

disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. (J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 9))

- b. Implementasi Strategi merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.
- c. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Alimul Hidayat, 2007). Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Strategi. Manajemen Strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. (J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9)) Manajemen strategi yang akan digunakan dalam penelitian ini mempunyai indikator yaitu :

a. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan Lingkungan adalah melakukan suatu pengamatan terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini diartikan melakukan suatu observasi terhadap gejala yang sedang terjadi.

b. Perumusan Strategi

Perumusan Strategi adalah merumuskan suatu strategi yang ingin dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya untuk membuat suatu rencana agar berjalan dengan maksimal dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah strategi dibuat dan dirumuskan. Kegiatan yang berkaitan dengan strategi dilaksanakan di tempat kejadian permasalahan yang sedang terjadi.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan guna mengukur suatu hasil kinerja yang telah dicapai setelah implementasi dilakukan.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah orang atau *human instrument*, yakni peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga

mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata – kata atau kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan masalah penelitian, yakni Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang.

Selain itu, hal-hal yang terdapat di dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Nasution (dalam Sugiyono, 2011:14) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaksanaan Implementasi Strategi Dinas Sosial di lokasi penelitian dan wawancara pada informan. Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1. Observasi (Pengamatan)

Sugiyono (2011:17) menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi berpartisipasi dan observasi terus terang.

Di dalam observasi berpartisipasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti yang melakukan pengamatan juga ikut merasakan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Sedangkan observasi secara terang-terangan adalah observasi yang melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Peneliti adalah pewawancara dan sumber data adalah orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara berupa garis-garis besar terkait indikator.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Indikator	Substansi Pertanyaan	Kode Informan

1.	Pengamatan Lingkungan (<i>Environmental Scanning</i>)	1. Analisis Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang ? • Apakah Sumber Daya yang dimiliki telah memadai dalam menangani gelandangan dan pengemis ? 	I ₁ I ₂ I ₃ I ₄ I ₅ I ₆ I ₇ I ₈ I ₉
		2. Analisis Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya masalah gelandangan dan pengemis ? • Apakah masyarakat paham adanya Perda Nomor 5 Tahun 2012 ? • Sudah berapa lama anda menjadi gepeng ? • Berapa penghasilan anda dalam sehari ? • Darimana anda berasal ? • Mengapa anda lebih memilih menjadi gepeng daripada yang lain ? 	
2.	Perumusan Strategi (<i>Strategy Formulation</i>)	1. Menentukan Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam menangani gelandangan dan pengemis ? 	
		2. Menentukan Tujuan yang dapat dicapai	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan apa yang ingin diselesaikan dalam menangani gelandangan dan pengemis ? 	

		3. Pengembangan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Adakah pengembangan strategi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?
		4. Penetapan Pedoman Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman apa yang digunakan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?
3.	Implementasi Strategi (<i>Strategy Implementation</i>)	1. Pengembangan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada program baru yang akan dibuat dalam menangani gelandangan dan pengemis ?
		2. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mencukupi untuk menangani gelandangan dan pengemis ? • Adakah rencana anggaran khusus yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang kepada pemerintah daerah Kota Tangerang ?
		3. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Satpol PP Kota Tangerang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang ?

4.	Evaluasi dan Pengendalian (<i>Evaluation and Control</i>)	1. Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pengendalian yang dilakukan setelah melakukan operasi penjaringan gelandangan dan pengemis agar tidak dapat kembali lagi ? 	
		2. Standar Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada standar kinerja yang telah diterapkan ? 	
		3. Mengukur Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Hasil kinerja yang telah dicapai setiap tahunnya ? 	

(Sumber : Peneliti, 2018)

Sedangkan data sekunder diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumentasi yang antara lain :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku referensi, laporan kerja instansi terkait dan jurnal penelitian sejenis.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen resmi dan relevan dengan penelitian yang berupa tulisan, gambar, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selain itu dokumentasi

juga catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, catatan-catatan serta menghimpun dokumen-dokumen dan menganalisisnya dengan masalah yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :

- a. Buku catatan, digunakan untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
- b. Kamera, digunakan untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*key informan*) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (*secondary informan*) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung.

Menurut Moleong (2013:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Orang yang telah dipilih untuk menjadi informan penelitian harus mempunyai banyak pengalaman atau informasi tentang latar penelitian. Pemilihan informan yang akan diwawancarai sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive, yaitu teknik pengambilan informan atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut dianggap layak dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan, serta membantu peneliti untuk lebih memahami situasi sosial yang diamati. Menurut Bungin (2011:107), purposive adalah strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive* yaitu memilih seluruh informan yang terkait dan dianggap layak serta representatif dalam memberikan informasi dan fakta. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Satpol PP Kota Tangerang dan informan lain yang dipandang perlu sampai jenuhnya informasi yang diberikan oleh informan. Berikut informan yang menurut peneliti dapat memberikan informasi sesuai judul yang peneliti ambil yaitu Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Keterangan	Kode Informan	Jumlah
I	Instansi Dinas Sosial a. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tangerang	<i>Key Informan</i>	I ₁	1
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Tangerang	<i>Key Informan</i>	I ₂	1
II	Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang a. Kepala seksi Operasi dan Pengendalian di Satpol PP	<i>Second Informan</i>	I ₃	1
III	Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang a. Petugas Rumah Singgah Dinas Sosial	<i>Second Informan</i>	I ₄	1
IV	Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Pangudi Luhur Bekasi a. Petugas PSBK Pangudi Luhur Bekasi	<i>Second Informan</i>	I ₅	1
V	Pengemis a. Pengemis 1 b. Pengemis 2	<i>Second Informan</i>	I ₆	1
		<i>Second Informan</i>	I ₇	1
VI	Masyarakat a. Di Jalanan b. Perumahan	<i>Second Informan</i>	I ₈	1
		<i>Second Informan</i>	I ₉	1
Jumlah				9

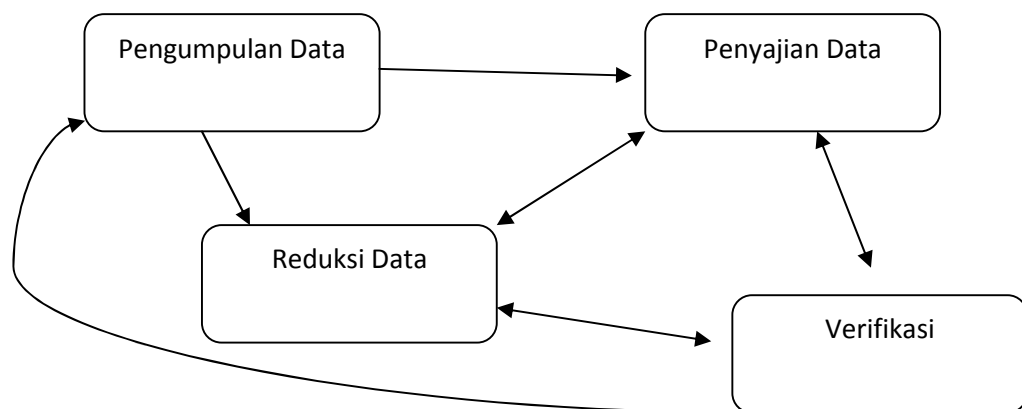
(Sumber : Peneliti, 2018)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Meleong, 2013:13) mengemukakan aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas dan datanya jenuh. Aktivitas analisis disajikan pada gambar di bawah ini :

Komponen Analisis Data (*Interactive Model*) dari Miles dan Huberman



Gambar 3.1 Bagan Interaktif Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman (Meleong, 2013:13)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Keempat hal tersebut merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Keempat hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam prakteknya, pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk penelitian kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penelitian kuantitatif). Merujuk pada hal tersebut, betapa pentingnya pengumpulan data dalam proses penelitian. Tanpa data lapangan, proses analisis data dan kesimpulan hasil penelitian, tidak dapat dilaksanakan.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Reduksi data juga berarti merangkum, memilih hal pokok, fokus pada hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Alur penting yang ketiga dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclusion Drawing/Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2011:55) menyatakan validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data itu. Untuk itu teknik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi Sumber Data dan Triangulasi Metode.

Menurut Paton dalam Moleong (2007:330) menyatakan teknik triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi metode adalah penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai macam informan penelitian. Selain itu, untuk mendukung

kevalidan data digunakan *membercheck*. Menurut Sugiyono (2014:276), Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dengan adanya kesepakatan dari pemberi data berarti data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga dapat dipercaya.

3.9 Jadwal dan Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang telah saya tuliskan, dimana di dalam jadwal penelitian ini dijelaskan bahwa selama aktivitas saya dalam mengerjakan penelitian ini dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Nama Kegiatan	Waktu Penelitian										
		2016	2017					2018				2019
		Sep - Des	Jan - Feb	Mar - Mei	Jun - Jul	Agus - Sep	Okt - Des	Jan - Mar	Apr - Jun	Jul - Sep	Okt - Des	Jan - Feb
1.	Pengajuan Judul											
2.	Observasi Awal											
3.	Penyusunan Proposal BAB I,II & III											
4.	Bimbingan & Perbaikan BAB I,II & III											
5.	Seminar Proposal Skripsi											
6.	Revisi Proposal Skripsi											
7.	Wawancara & Observasi Lapangan											
8.	Penyusunan Hasil Wawancara											
9.	Bimbingan & Perbaikan BAB IV & V											
10.	Sidang Skripsi											
11.	Revisi Skripsi											

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Tangerang, gambaran umum Dinas Sosial Kota Tangerang. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini :

4.1.1 Profil Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bekasi di provinsi Jawa Barat dan dilalui oleh Jalan Nasional Rute 1. Letak Kota Tangerang Secara geografis Kota Tangerang terletak antara 6° 06' – 6° 13' Lintang Selatan (LS) dan 106° 36' – 106° 42' Bujur Timur (BT). Kota Tangerang berjarak ±60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota

Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan Ibukota Negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional, seperti Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara. Letak geografis Kota Tangerang yang strategis tersebut telah mendorong pertumbuhan aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini. Kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Administratif Luas wilayah Kota Tangerang adalah ± 16.455 ha (tidak termasuk Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta seluas ± 1.969 ha). Secara administratif, Kota Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan Timur (Kabupaten Tangerang);
- Sebelah Selatan : Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua (Kabupaten Tangerang), serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan);
- Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa (Kabupaten Tangerang); dan

- Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta).



Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Tangerang

4.1.1.1 Visi dan Misi Kota Tangerang

a. Visi Kota Tangerang

“Kota Tangerang sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Permukiman yang ramah lingkungan dalam masyarakat yang berakhlak mulia.”

b. Misi Kota Tangerang

1. Memulihkan dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota;

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik;
3. Penguatan Tata Pemerintahan yang Baik; dan
4. Mewujudkan Pembangunan yang Ramah Lingkungan.

4.1.2 Deskripsi Dinas Sosial Kota Tangerang

Dinas Sosial Kota Tangerang adalah sebuah Dinas yang bertugas dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 1 Bendung Pintu Air Sepuluh, Neglasari, Kota Tangerang.



Gambar 4.2 Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Tangerang

a. Visi

Sesuai dengan tujuan Dinas Sosial dengan melihat situasi dan kondisi yang ada maka diformulasikan Visi Dinas Sosial Kota Tangerang, yaitu : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial.

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka misi utama Dinas Sosial Kota Tangerang adalah :

- 1.** Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2.** Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 3.** Pembinaan Anak Terlantar.
- 4.** Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Tuna Susila.
- 5.** Pembinaan Panti Asuhan - Panti Jompo.
- 6.** Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial, Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya.
- 7.** Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

4.1.2.2 Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Tangerang

Dinas Sosial Kota Tangerang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

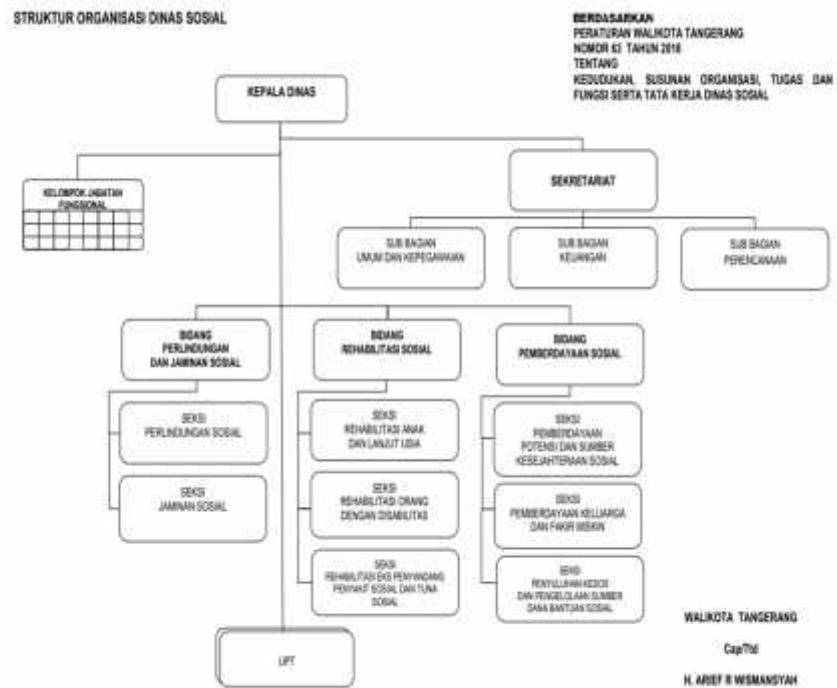
4.1.2.3 Fungsi Dinas Sosial Kota Tangerang

Fungsi Dinas Sosial Kota Tangerang yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang sosial;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.1.2.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang

Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah :

- a. Kepala Dinas Sosial.
- b. Sekertaris Dinas Sosial, membawahkan :
 - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - iii. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :

- i. Kepala Seksi Perlindungan Sosial;
 - ii. Kepala Seksi Jaminan Sosial.
- d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
- i. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
 - ii. Kepala Seksi Rehabilitasi Orang Dengan Disabilitas;
 - iii. Kepala Seksi Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial & Tuna Sosial.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
- i. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - ii. Kepala Seksi Pemeberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
 - iii. Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.3 Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.1.3.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

1. Visi

“Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Yang Manusiawi Dan Berkeadilan Dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah”.

2. Misi

Ada 3 misi Satpol PP Kota Tangerang yaitu :

1. Mengefektifkan Implementasi Dan Penegakan Peraturan Daerah.
2. Mendorong Kemandirian Ketentraman Dan Ketertiban Yang Manusiawi Dan Berkeadilan Dalam Menjaga Kondusifitas Lingkungan.
3. Mengembangkan Kapasitas Lembaga Dan Aparatur Yang Berintegritas Dan Kompeten.

4.1.3.2 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Tugas Pokok dari Satpol PP Kota Tangerang yaitu :

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.1.3.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) yaitu penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) yaitu penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) yaitu penegakan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

4. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja);
5. Pembinaan para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
8. Pengelolaan UPT; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian mengenai “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang” menggunakan beberapa informan sebagai sumber data yang kemudian

diklasifikasikan ke dalam informan kunci (*key informan*) dan informan pembantu (*secondary informan*). Informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, karena informan dalam kesehariannya senantiasa berhubungan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik yang digunakan dalam melakukan wawancara dengan mengetahui narasumber yang akan diwawancarai.

Informan kunci (*key informan*) merupakan unsur Dinas Sosial Kota Tangerang yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan unsur Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang. Sedangkan informan sekunder (*secondary informan*) merupakan dari Pengurus Panti Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur (PSBK) Bekasi, Petugas Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang, Pengemis, dan masyarakat yang ada di Kota Tangerang.

Jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini sebanyak 9 orang informan. Informan tersebut antara lain :

Tabel 4.1

Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Keterangan	Kode Informan
1.	Drs.Iing Riskomar, M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial	Key Informan	I ₁
2.	Caryo Wijaya, MDSSp	Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Sosial	Key Informan	I ₂
3.	Bobby Ertanto, M.Si	Kepala seksi Operasi dan Pengendalian di Satpol PP	Second Informan	I ₃

4.	Hudin	Petugas Singgah Sosial	Rumah Dinas	Second Informan	I ₄
5.	Ilham	Petugas Pangudi Bekasi	PSBK Luhur	Second Informan	I ₅
6.	Suhartini	Pengemis		Second Informan	I ₆
7.	Iroh	Pengemis		Second Informan	I ₇
8.	Toni	Masyarakat		Second Informan	I ₈
9.	Siti Rosidah	Masyarakat		Second Informan	I ₉

(Sumber : Peneliti, 2018)

4.3 Deskripsi dan Analisis Data Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang”, data yang peneliti dapatkan berupa kata-kata melalui proses wawancara dan observasi terang-terangan. Selain data berupa kata-kata dan tindakan, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi foto guna menguatkan data penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori menurut Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996:9), proses Manajemen Strategis meliputi 4 elemen dasar, yaitu Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*), Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), dan Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*). Disini penulis mencoba mempresentasikan Implementasi Strategi Dinas Sosial Kota Tangerang menggunakan Teori Manajemen Strategi dari David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen tersebut.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, bahwa dalam prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (*data collection*) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu :

1. Kode Q untuk menunjukkan kode pertanyaan
2. Kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya untuk menunjukkan urutan pertanyaan
3. Kode I untuk menunjukkan informan
4. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya untuk menunjukkan urutan informan

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo (2011:244). Kemudian penyajian data

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Analisis data kualitatif yang terakhir menurut Miles dan Huberman (2009 :16) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data bersifat jenuh artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan aktifitas analisis data dilakukan secara bersamaan. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam proses analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan *membercheck*.

Matriks triangulasi sumber disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Matriks Triangulasi Sumber

Item Data	Wawancara	Observasi	Validasi	Jumlah
Informan Kunci (Unsur Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Tangerang)	✓	✓	✓	2 Informan
Informan Sekunder (Tempat Pembinaan Rehabilitasi Sosial dan Masyarakat)	✓	✓	✓	7 Informan

(Sumber : Peneliti, 2018)

Kegiatan wawancara dengan informan penelitian, peneliti menggunakan lembar wawancara menggunakan teori Manajemen Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang. Model teori Manajemen Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger memiliki 4 dimensi, yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian. Disini peneliti akan lebih memfokuskan kepada hasil dari Implementasi Strategi Dinas Sosial dari teori Manajemen berikut :

4.3.1 Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ketiga hal tersebut merupakan modal utama bagi pemerintah dalam mengerjakan program program pembangunan. Salah satu yang menjadi target pemerintah dalam implementasi program adalah bagaimana program tersebut dapat mengatasi masalah publik serta dapat mencapai sarannya.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok

di pemerintah. Berbagai pihak yang terkait tersebut merupakan actor actor yang berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan.

Secara manajemen strategi, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh tiga faktor utama, (Thomas L Wheelen dan David J. Hunger, 1996:13) yaitu :

1. Program

Pemerintah Kota Tangerang harus mengatasi permasalahan permasalahan publik sendiri termasuk permasalahan yang menyangkut dengan pengemis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan program pembinaan maupun program pelatihan, khususnya untuk para pengemis yang ada di wilayah Kota Tangerang dalam bentuk peraturan daerah.

“...Ya. Kita Dinas Sosial sendiri sebagai pelaksana kebijakan, sudah membuat program untuk para pengemis yang ada di Kota Tangerang, Program tersebut juga berkaitan dengan peraturan daerah yang ada...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam rangka menangani permasalahan pengemis tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun perangkat kebijakan tentang pembinaan dan pelatihan kepada pengemis di wilayahnya dalam bentuk peraturan daerah (perda) dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh para pengemis.

“...Kita sudah membuat sebuah program kebijakan untuk mengatasi masalah pengemis tersebut, dengan mengacu kepada peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis...” (Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Adapun Program program pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah PMKS, program tersebut meliputi 4 program umum yakni :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Program Pemberdayaan Sosial
- d. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan kesejahteraan Sosial.

“...Ada 4 program umum yang kita harus laksanakan, program tersebut dari kementerian sosial yang diarahkan kepada PMKS untuk memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan program yang berkelanjutan...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Berkaitan dengan 4 program tersebut pemerintah Dinas Sosial ingin menegaskan melalui peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang dengan tujuan untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“...Ya kita ingin menegaskan melalui perda tersebut dengan tujuan kami sebagai pemerintah ingin mengentaskan masalah PMKS, kalo tujuan secara umumnya mah itu, seperti kemiskinan, pengangguran, pembinaan dan lain lain...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Tujuan dari peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 adalah untuk mengatasi masalah PMKS secara umum yang ada di Kota Tangerang.

Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Sosial juga telah bekerja sama dengan pihak pihak terkait seperti Satpol PP dalam hal penegakkan peraturan daerah tersebut, khususnya untuk menanggulangi masalah pengemis yang ada di Kota Tangerang.

“...Di tahun 2018 ini penegakan perda (peraturan daerah) kita bersama sama dengan Satpol PP itu continue terus menerus melakukan operasi di jalan seperti gelandangan, pengemis, dan lain lain. Intinya Kota Tangerang ini nanti akan menjadi kota yang layak huni...” (Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Pihak Dinas Sosial juga mengharapkan kepada masyarakat Kota Tangerang untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam hal melakukan penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, ini dikarenakan bahwa masyarakat Kota Tangerang sendiri yang terkena dampaknya dari adanya para pengemis yang melakukan aktivitasnya di jalanan dan di tempat tempat umum lainnya, hal ini juga agar perda tersebut bisa dapat berjalan dengan baik dan memberantas pengemis yang ada di Kota Tangerang.

“...didalam peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 ini tugas kita untuk bagaimana bisa memberantas pengemis yang ada di jalan, dalam hal ini adalah tugas kita bersama, terus jangan tugas pemerintahnya saja, tetapi termasuk masyarakat juga ikut turut membantu dan berkontribusi...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Hal tersebut akan melibatkan masyarakat Kota Tangerang untuk terus berpartisipasi dalam mengatasi masalah pengemis yang ada di Kota Tangerang, ini bisa menimbulkan anggapan masyarakat terhadap adanya

para pengemis di jalan yang terasa mengganggu dan cukup meresahkan kehadirannya.

“...Kalau saya sendiri sih merasa keganggu ya dan juga risih melihatnya. Seperti yang ada di lampu merah itu suka banyak yang meminta minta, terus ada juga kalau saya lagi di bus atau lagi naik angkutan umum itu juga suka ada yang ngamen. Tapi saya mah suka kasihan gitu liatnya jadi saya kasih aja 2 ribu kalau gk gope...” (Wawancara dengan I₈ di Di Pinggir Jalan Kota Tangerang, 8 September 2018).

Selanjutnya mengenai hal tersebut masyarakat yang lain juga terasa terganggu dengan kehadiran adanya pengemis di Kota Tangerang.

“...Cukup mengganggu ya, soalnya saya sendiri sebagai ibu rumah tangga kalau lagi ngurusin kerjaan rumah kayak lagi nguci baju atau lagi masak itu suka ada aja yang ngamen atau gak pengemis yang minta minta. Terkadang juga datengnya bukan sekali dua kali tapi bisa pagi siang sore juga suka ada...” (Wawancara dengan I₉ di Di Perumahan Kota Tangerang, 8 September 2018)

Berdasarkan pendapat masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat terasa terganggu dengan adanya pengemis yang ada di jalanan maupun di sekitar rumah. Hal tersebut memang menjadi masalah kepada masyarakat Kota Tangerang dikarenakan masyarakat sendirilah yang merasakan dengan adanya kehadiran para pengemis tersebut.

Masyarakat juga masih ada yang memberikan uang kepada para pengemis yang ada di jalan dengan perasaan kasihan dan merasa iba. Terkait dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 pasal 18 mengenai pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bahwa masyarakat tidak boleh memberikan uang ataupun barang kepada para pengemis yang ada di jalan maupun di tempat tempat umum lainnya.

Masyarakat Kota Tangerang sendiri juga ada yang belum mengetahui dan ada juga yang sudah mengetahui perihal peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tersebut.

“...Iya, saya tau kalau ada peraturan daerah yang berkaitan dengan dilarang memberi uang atau barang apapun kepada seorang pengemis dan gelandangan. Saya juga suka liat di lampu lampu lalu lintas ada gambar seorang pengemis yang sedang meminta uang dan di berikan tanda silang. Tapi saya suka tetap saja memberinya karena kasihan melihatnya, walaupun ada denda sama sanksi dari Dinas Sosial mereka juga tidak pernah tau soal itu”... (Wawancara dengan I₉ di Perumahan Kota Tangerang, 8 September 2018)

Mengenai hal perda tersebut juga disampaikan oleh I₈ sebagai berikut :

“...Belum tau mas, saya gk pernah denger soal begituan...” (Wawancara dengan I₈ di Di Pinggir Jalan Kota Tangerang, 8 September 2018)

Selanjutnya peneliti melakukan pertanyaan yang sama kepada I₉ yaitu :

“...Iya saya pernah liat itu suka ada di lampu merah kayak spanduk atau larangan mengenai dilarang memberikan uang kepada pengemis atau pengamen di jalanan...” (Wawancara dengan I₉ di Di Perumahan Kota Tangerang, 8 September 2018)

Dengan pendapat berikut dapat disimpulkan bahwa, Jadi ada masyarakat yang sudah tau dan ada juga yang belum mengetahui mengenai peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 mengenai pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bahwa masyarakat tidak boleh memberikan uang ataupun barang kepada para pengemis yang ada di jalan maupun di tempat tempat umum lainnya. Dengan begitu seharusnya masyarakat yang sudah paham ataupun pernah melihat sebuah larangan mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis maka mereka bisa mengaplikasikannya tanpa memberikan uang kepada pengemis tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Dinas Sosial sebelumnya bahwa masyarakat bisa membantu dan berkontribusi untuk mengatasi masalah pengemis ini, dan bisa mengerti isi yang ada didalam perda mengenai larangan yang dimana terdapat sanksi atau denda dan hukuman bagi yang melanggar perda tersebut.

“...Dengan cara apa sih membantunya masyarakat, itu kita ikutin aja peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tadi, di satu sisi si pengemis tidak boleh beraktivitas di jalan dan di sisi lain dalam peraturan daerah tersebut ada yang mengatur tidak boleh memberi, karena yang ngamen atau yang ngemis atau yang memberi itu sama sama kena sanksi dua duanya, nanti kalau masyarakat mau membantu, masyarakat pun jangan memberi, karena kalau ketahuan dia akan kena sanksi Rp 500.000 dendanya atau kurungan 3 bulan paling lama berdasarkan peraturan daerah tadi. Dengan begitu sebaiknya kita mematuhi peraturan tadi agar dapat tidak adanya lagi pengemis yang mau datang ke Kota Tangerang. Coba kita liat aja kalau kita tidak memberi kepada mereka, nanti mereka pun pada malas dan tidak mau ngemis dan ngamen di Kota Tangerang lagi...”
(Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Dapat disimpulkan bahwa mengenai larangan dan ketentuan denda ataupun hukuman sudah tercantum dalam perda nomor 5 tahun 2012 BAB VII mengenai Larangan Pasal 16 pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis, termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.

Selanjutnya mengenai ketentuan sanksi masyarakat juga akan dikenakan denda jika memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis seperti yang sudah ditentukan oleh perda nomer 5 tahun 2012 pada BAB VIII Ketentuan Sanksi Pasal 17 pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat

(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dari peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 pasal 16 dan 17 tersebut diketahui bahwa seharusnya masyarakat Kota Tangerang terhadap adanya Peraturan Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah bisa membantu dan mematuhi peraturan yang ada agar terciptanya suatu perubahan yang ada di Kota Tangerang, khususnya dalam membersihkan serta menuntaskan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pengemis yang ada di pusat Kota Tangerang, yaitu tepatnya di tempat tempat umum di Kota Tangerang.

Terkait masalah tersebut masyarakat juga ada yang belum mengetahui peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012, dengan begitu pemerintah Dinas

Sosial Kota Tangerang ingin mengadakan suatu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui tentang perda tersebut dan juga menghadirkan para pengemis untuk diberikan penjelasan mengenai kegiatan pembinaan secara keagamaan agar mereka lebih taat kepada Tuhan, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh I₁ selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Tangerang mengatakan :

“...Untuk tahun 2019 nantinya Dinas Sosial sendiri itu memberikan suatu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan juga menghadirkan para pengemis guna memberikan sebuah kegiatan pembinaan secara keagamaan dan juga agar masyarakat lebih mengetahui masalah pengemis ini dan diberikan penjelasan mengenai peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Tangerang...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Mengenai kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat Kota Tangerang lebih mengetahui tentang perda tersebut dan dinyatakan bahwa perda tersebut belum sepenuhnya ditegakkan sehingga masih ada masyarakat yang memberikan uang ataupun barang kepada pengemis di jalanan dengan tidak adanya sanksi ataupun hukuman yang melanggarnya, hal yang senada juga disampaikan oleh I₂ yaitu :

“...Kalau dilihat dari buktinya disosialisasikan ke masyarakatnya juga belum ya, misalkan katanya orang-orang yang ngasih ke pengemis katanya kena sanksi, nyatanya tidak kena sanksi. Sehingga perda itu belum kuat. Untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah pengemis ini...” (Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Untuk mengenai hal program peneliti juga menanyakan kepada I₃ yaitu

:

“...Untuk program seperti pembinaan dan rehabilitasi dan bantuan lain-lain adalah tugas dari Dinas Sosial, dalam kapasitas kita itu tugas pokoknya hanya mengeksekusi dari tempat kejadian terus dikirim ke dinas sosial, yang buat program ini kan dinas sosial, jadi yang ngebina, ngerehab, yang ngasih bantuan itu Dinas Sosial dan juga perencanaan dan segala sesuatunya ada di Dinas Sosial, soalnya mereka yang buat programnya...” (Wawancara dengan I₃ di Satpol PP Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Dinas Sosial akan membuat sebuah rencana ataupun strategi yang baru yakni tidak hanya melakukan suatu program rehabilitasi sosial dengan pembinaan maupun pelatihan tetapi juga dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga dengan pendekatan keagamaan kepada pengemis, yang nantinya para pengemis diharapkan akan bertaubat atau lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu mereka pun akan lebih taat kepada agamanya masing masing, dan mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh agama.

Hal ini dilakukan agar para pelaksana kebijakan seperti Dinas Sosial benar-benar siap dalam melakukan sosialisasi perda No 5 Tahun 2012 tentang pembinaan pengemis dan juga masalah PMKS, dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran

kebijakan seperti masyarakat Kota Tangerang dan memberikan informasi kepada pengemis serta pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Anggaran

Berkaitan dengan program dan juga pelaksanaan perda pasti ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu untuk menunjang semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sendiri, dengan demikian hal tersebut disampaikan oleh I₁ sebagai berikut :

“...Kalau untuk soal anggaran ya pasti ada, iya mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari anggaran untuk pembinaan, pelatihan keterampilan, membuat fasilitas untuk menunjang dalam masa pembinaan dan juga untuk mereka agar bisa hidup lebih mandiri lagi...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Dinas Sosial sudah menyiapkan dana untuk perencanaan pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial, hanya saja mereka sedang mencari lahan untuk tempat pembuatan panti tersebut. Kemudian hal tersebut juga disampaikan oleh I₂ sebagai berikut :

“...Dana juga menurut saya mah mencukupi ya, karena di setiap program sudah disiapkan jumlah anggarannya, dan untuk pembangunan panti juga sudah kita siapkan dananya, hanya saja lahan untuk tempat rehabilitasi juga kan gak ada kita mah...” (Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Satpol PP Kota Tangerang juga memiliki anggaran sendiri guna melaksanakan kegiatannya, hal tersebut disampaikan oleh I₃ yaitu :

“...Untuk anggaran sendiri kita hanya untuk kendaraan operasional kita dalam proses operasi razia selebihnya kita untuk jaminan dan lain lain...” (Wawancara dengan I₃ di Satpol PP Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan I₄ sebagai berikut :

“...Anggaran yang diberikan dari pemerintah kita gunakan untuk merawat dan melaksanakan tugas disini...” (Wawancara dengan I₄ di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Terkait anggaran yang diberikan oleh pemerintah, untuk Panti PSBK Bekasi juga diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi semua kegiatan yang ada, Kemudian hal tersebut juga disampaikan oleh I₅ yang memberikan tanggapan seperti berikut :

“...Kalau anggaran sendiri kita sudah diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi semua kegiatan yang ada, kita kan disini itu tugasnya memberikan pelatihan kepada mereka, dan juga menyiapkan semua fasilitas yang mereka butuhkan, untuk itu semua kita sudah atur mulai dari sarana, tempat tinggal, makanan, terus fasilitas, bahkan untuk pelatihnya juga yang nantinya akan menjadi mentor mereka juga udah kita siapkan. Nah kalau untuk makan sendiri mereka itu sudah kita siapkan untuk membuat makanan sendiri agar lebih mandiri, jadi bukan kita yang menyiapkan. kan mereka juga sudah diberikan pelatihan bagaimana cara membuat tempe, tahu, terus ada pelatihan memasak juga...” (Wawancara dengan I₅ di Panti Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, 14 Maret 2018)

Dapat disimpulkan bahwa Anggaran untuk setiap instansi sudah disiapkan dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan masing masing instansi. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa jumlah permasalahan anggaran yang dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, untuk disetiap program dinilai sudah mencukupi hanya saja kekurangan lahan untuk mengeluarkan dana buat pembangunan panti rehabilitasi sosial sendiri, hal ini dapat

menghambat proses penanganan pengemis di Kota Tangerang dikarenakan dengan tidak adanya lahan, maka Pemerintah Kota Tangerang yakni Dinas Sosial Kota Tangerang tidak bisa membangun tempat Rehabilitasi Sosial guna menanggulangi penyakit masyarakat seperti pengemis yang berada di Kota Tangerang, hal ini menjadi perhatian pemerintah khususnya peneliti sendiri agar lebih berharap lagi kepada pemerintah pusat untuk lebih memberikan perhatian terhadap pembangunan rehabilitasi, agar dapat meminimalisir pengemis di Kota Tangerang. Sedangkan untuk PSBK Pangudi luhur Bekasi sendiri anggaran itu digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu semua anggaran harus terpenuhi dan bisa direalisasikan secara nyata agar bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Berikut Jumlah anggaran yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, yaitu :

Tabel 4.3
Jumlah Anggaran untuk Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

No	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Anggaran
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek bagi Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Rp. 123,224,900
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Rp. 192,610,700
3	Penanganan Masalah masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp. 1,272,920,000

4	Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra	Rp. 55,500,000
	Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara	Rp. 30,246,900
	Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Daksa	Rp. 67,736,200
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 1,742,238,700

(Sumber : Dinas Sosial Kota Tangerang)

Selain anggaran untuk setiap instansi, Dinas Sosial juga merencanakan soal anggaran khusus yang dibuat oleh Dinas Sosial yang akan diajukan juga ke pemerintah, hal tersebut disampaikan oleh I₁ yaitu :

“...Anggaran khusus ada sebenarnya tahun 2017 lalu pihaknya sudah menyediakan pagu anggaran untuk pembangunan panti rehabilitasi sosial. Namun anggaran itu tidak terserap karena kesulitan mencari lahan. Kami memang sangat membutuhkan panti rehabilitasi sosial untuk menangani PMKS yang ada di Kota Tangerang. Kalau yang sekarang setelah menerima hasil operasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan langsung dikirim ke Bekasi...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Hal tersebut juga senada dengan I₂ mengemukakan bahwa :

“...Ya memang ada rencana anggaran khusus dari kita (Dinsos) kepada pemerintah daerah kota tangerang yaitu guna membuat panti rehabilitasi sosial sendiri di tangerang biar nggak usah dikirim ke Bekasi lagi...” (Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh I₃ sebagai berikut :

“...Untuk anggaran khusus kita belum ada yang diajukan ke pemerintah, paling kita hanya untuk kendaraan operasional saja untuk menunjang kegiatan kita...” (Wawancara dengan I₃ di Satpol PP Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Panti Rehabilitasi sosial yang menyatakan sebagai berikut :

“...Kalau untuk anggaran khusus itu Dinas Sosial sendiri yang tau, kita mah gk tau soal itu, itu kan dinsos sendiri yang merencanakan, kita kan bagian dari Dinas Sosial jadi kita cuman bisa menjaga dan merawat aja selebihnya dinsos sendiri yang mengatur...” (Wawancara dengan I₄ di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Sosial ada anggaran khusus yang dibuat untuk membuat Panti Rehabilitasi Sosial sendiri di Kota Tangerang agar tidak mengirimkan ke Bekasi lagi untuk melakukan pelatihan dan pembinaan sehingga nantinya Kota Tangerang mempunyai Panti Rehabilitasi Sosial sendiri untuk menunjang kegiatan Dinas Sosial dalam menjalankan program rehabilitasi sosial tersebut. Sedangkan untuk Satpol PP sendiri hanya untuk kebutuhan kegiatan operasional saja dan untuk Rumah Singgah Dinas Sosial itu sudah ada yang mengatur soal anggarannya.

3. Prosedur

Dalam Implementasi Strategi harus ada sebuah prosedur yang dibuat agar mencapai hasil dan tujuan dari implementasi tersebut. Dinas Sosial Kota Tangerang harus membuat sebuah prosedur atau tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus diselesaikan. Masalah tersebut khususnya untuk mengatasi para pengemis yang ada di Kota Tangerang diperlukannya suatu tahapan kegiatan agar bisa terimplementasi dengan baik. Soal tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi pengemis, dinyatakan oleh I₁ sebagai berikut :

“...Kalau dari dinas sosial sendiri tahapan kita itu pertama kita melakukan operasi razia yang dilakukan oleh satpol pp selanjutnya setelah melakukan operasi razia, kita akan memberikan sebuah arahan atau pembinaan secara lisan, selanjutnya kita tidak langsung kirim ke panti PSBK bekasi, kita bawa mereka ke rumah singgah terlebih dahulu, disini mereka hanya di data dan klasifikasikan berdasarkan kriteria jenis PMKS mereka, lalu baru mereka ini dibawa ke panti sosial PSBK Pangudi Luhur di Bekasi untuk diberikan sebuah pembinaan secara langsung selama 6 bulan seperti itu...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa Dinas Sosial melakukan kegiatannya diawali dengan memberikan perintah kepada Satpol PP Kota Tangerang untuk melakukan kegiatan Operasi Razia terhadap para pengemis yang ada di jalanan selanjutnya para pengemis yang tertangkap akan dibawa ke Rumah Singgah milik Dinas Sosial untuk melakukan suatu pendataan kepada para pengemis guna mengetahui identitas dari pengemis yang sudah tertangkap tersebut selanjutnya Dinas Sosial Kota Tangerang akan mengirimkan para pengemis tersebut ke PSBK Pangudi Luhur yang ada di Bekasi guna menjalankan program Rehabilitasi Sosial dengan diberikannya suatu pembinaan dan pelatihan secara intensif selama 6 bulan selanjutnya mereka para pengemis yang sudah melalui masa rehabilitasi akan dipulangkan ke tempat asalnya masing masing, Sedangkan tahapan kegiatan yang dilakukan Satpol PP yaitu setelah mereka mendapatkan perintah dari Dinas Sosial, Satpol PP pun bergerak sesuai dengan prosedurnya yang sudah ditentukan.

“...Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri yaitu dengan yang pertama itu pimpinan memberikan arahan anggota yang bertugas, yang kedua mempersiapkan kendaraan operasional, yang ketiga melaksanakan apel untuk memberi arahan kepada anggota

yang bertugas, yang keempat pemberian surat perintah kepada danton atau kepada pemimpin regu, yang kelima melakukan pelaksanaan perintah, yang keenam melakukan pendataan lalu dibawa ke Dinas Sosial...” (Wawancara dengan I₃ di Satpol PP Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Satpol PP juga tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan Operasi Razia kepada para pengemis, hal ini dikarenakan mereka juga harus mendapatkan sebuah perintah dari Dinas Sosial itu sendiri, dengan begitu para Satpol PP langsung melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian mengenai hal tersebut Panti PSBK Pangudi Luhur Bekasi juga melakukan tahapannya dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial yang dimana para pengemis yang sudah tertangkap razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, mereka akan menjalani masa pembinaan dan pelatihan agar dapat bisa memiliki keahlian ataupun kemampuan dalam bekerja untuk mendapatkan uang yang lebih layak sehingga mereka para pengemis tidak lagi melakukan aktivitasnya di jalanan dengan mengadahkan tangan kepada masyarakat hanya untuk mendapatkan uang dari rasa belas kasihan. Hal tersebut disampaikan juga oleh I₅ yang menyatakan seperti berikut :

“...Mengenai tahapan kita itu berawal dari Dinsos yang melakukan perintah untuk melakukan operasi razia selanjutnya Satpol PP yang menjadi eksekutor untuk proses penangkapan dan razia. Setelah itu mereka di data dan dikirimkan ke kita untuk diberikan pelatihan dan pembinaan, nah disini kita memberikan mereka pelatihan itu selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu mereka akan tinggal di sebuah tempat seperti kos kosan yang sudah kami sediakan. Selanjutnya mereka akan langsung diarahkan untuk melakukan pelatihan seperti montir, menjahit, membuat tahu atau tempe, memotong rambut seperti di salon dan masih banyak lagi, bahkan ada loh mas yang memesan produk dari mereka ini untuk membelinya, berarti kan mereka ini sudah ada yang dipercaya oleh masyarakat

dan bisa untuk memulai usahanya sendiri, nah setelah 6 bulan selesai melakukan pembinaan, mereka akan kami pulangkan ke rumahnya masing masing dan kami berikan dana untuk mereka bisa membuat usaha sendiri nantinya...” (Wawancara dengan I₅ di Panti Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, 14 Maret 2018)

Dari semua hal yang sudah disampaikan peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap instansi sudah memiliki tugas dan fungsinya masing masing. Untuk Dinas Sosial sendiri dengan memberikan arahan kepada Satpol PP untuk melakukan operasi razia dan melakukan penangkapan lalu setelah penangkapan akan didata dan di tempatkan di Rumah Singgah Dinas Sosial, setelah dari rumah singgah lalu dikirimkan ke PSBK Panti Sosial di Bekasi untuk diberikan sebuah pembinaan dan pelatihan selama 6 bulan. Mereka di PSBK Bekasi para pengemis sudah diberikan tempat tinggal seperti tempat Kos kosan.



Gambar 4.4 Tempat Tinggal Gepeng di PSBK Pangudi Luhur Bekasi

Para Pengemis tinggal ditempat tersebut selama 6 bulan selama masa program Rehabilitasi Sosial untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan

pembinaan secara langsung. Selanjutnya setelah 6 bulan selesai mereka akan di pulangkan ke daerah rumahnya masing masing dan diberikan bantuan untuk membuat usaha sendiri ataupun untuk bekerja di orang lain.

Selain tahapan yang dilakukan pasti ada hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan, Setiap kebijakan pastinya memiliki kendala-kendala yang terkadang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan. Program rehabilitasi sosial dalam mengatasi pengemis ini pastinya memiliki kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelenggara. Lalu apa saja yang menjadi hambatan tersebut, peneliti menanyakan soal tersebut kepada I₁ yang menyatakan berikut :

“...Kendalanya ya kadang-kadang kalo pada saat kegiatan pendataan para pengemis itu ada yang sama orangnya, nah si pengemis nya ini balik lagi balik lagi kaya gak kapok-kapok walaupun sudah terkena operasi razia oleh kami dan sudah mendapatkan pembinaan...” (Wawancara dengan I₁ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 8 Maret 2018)

Berdasarkan pendapat Dinas Sosial bahwa para pengemis selalu datang kembali lagi ke Kota Tangerang walaupun sudah mendapatkan pembinaan dan juga pelatihan, mereka ini orang yang sama ketika tertangkap pada saat melakukan razia, jadi terkadang pemerintah Dinas Sosial juga kebingungan dengan hal seperti ini, seharusnya mereka para pengemis sadar setelah dibina tetapi mereka para pengemis malah kembali datang untuk melakukan ngemis lagi di jalanan. Pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang juga tidak menyangka bahwa para pengemis yang datang ke Kota Tangerang rata rata

berasal dari luar Kota Tangerang, jadi mereka para pengemis ini bukan warga asli Kota Tangerang, seperti yang disampaikan oleh I₂ yaitu :

“...Kendalanya ya memang setelah kita melakukan pendataan para pengemis ini mayoritas berasal dari luar Kota Tangerang, jadi mereka bukan asli warga Kota Tangerang terus terkadang mereka itu para pengemis susah untuk diajak berkomunikasi, ada yang pas kita data itu lagi keadaan mabuk, terus mereka juga kalau ditanya suka pura pura gk tahu ya jadikan kita susah untuk ngedatannya...”
(Wawancara dengan I₂ di Dinas Sosial Kota Tangerang, 19 April 2018)

Selain hambatan yang dilakukan Dinas Sosial, Satpol PP yang bertugas sebagai eksekutor dalam penanganan masalah pengemis ini juga mempunyai hambatan dalam setiap kegiatannya, Hal tersebut dinyatakan oleh I₃ sebagai berikut :

“...Kalau hambatan sendiri sih terkadang mereka itu sudah tau kalau nantinya ada kegiatan operasi razia yang kita lakukan. Jadinya mereka suka kabur atau melarikan diri supaya tidak tertangkap saat operasi razia. Memang itu terkadang para pengemis itu pas kita samperin itu pada lari...” (Wawancara dengan I₃ di Satpol PP Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Satpol PP yang menjalankan operasi razia juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya seperti para pengemis yang sudah tau pada saat ingin diadakan operasi razia, mereka jadi kabur dan melarikan diri supaya tidak terkena razia oleh Satpol PP. Sehingga para pengemis menjadi tidak ada pada saat operasi razia berlangsung di tempat kejadian perkara. Selain Satpol PP Kota Tangerang, ada tempat Rumah Singgah yang memiliki hambatan juga yakni memang Dinas Sosial kekurangan lahan dalam pembuatan Panti Rehabilitasi Sosial dengan begitu tempat sementara untuk penampungan para pengemis yang sudah tertangkap dalam operasi razia

yaitu di Rumah Singgah milik Dinas Sosial Kota Tangerang, dimana tempat Rumah Singgah ini kesulitan untuk menampung para pengemis apabila sudah banyak yang tertangkap jadi tempat penampungan rumah singgah penuh oleh pengemis dan juga oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang lainnya.

“...Kalau hambatannya sendiri kita memang kekurangan lahan untuk membuat panti rehabilitasi sosial sendiri ya, dan ini juga tepat rumah singgah dinas sosial terkadang masih kurang cukup menampung gepeng yang abis tertangkap razia...” (Wawancara dengan I₄ di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang, 17 Mei 2018)

Hal ini juga ditanyakan kepada I₅ yang sebagai pelaksana program panti rehabilitasi sosial yaitu :

“...Terkadang mereka itu suka ada aja yang tidak betah tinggal di panti rehabilitasi, ada yang pengen pulang ke rumahnya dan ada juga yang pengen kabur, tapi Alhamdulillah sebagian besar sih para pengemis ini mereka betah dan pengen tinggal disini karena dikasih tempat tinggal dikasih makan tapi memang saja mereka terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu memang agak sulit juga ya mengatur mereka memang terkadang jiwa mereka yang masih ingin mencari uang dengan cara mengemis dan mengamen pasti mereka juga akan gk betah untuk tinggal disini selama 6 bulan...” (Wawancara dengan I₅ di Panti Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi, 14 Maret 2018)

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan seluruh informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendalanya dalam program rehabilitasi sosial dalam menangani pengemis itu adalah kurangnya tempat lahan untuk membuat panti rehabilitasi sosial dan sulitnya untuk melakukan pendekatan dengan para pengemis, dan juga anggaran yang belum terealisasi serta kurangnya peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang melarang memberikan uang kepada pengemis.

Para pengemis yang sudah menjalani masa pembinaan diharapkan agar mereka bisa mandiri dengan mempunyai usaha sendiri ataupun dapat bekerja di perusahaan dengan bidangnya masing masing untuk merubah keadaannya dan juga yang sangat diharapkan kembali adalah supaya agar mereka tidak kembali mengemis di jalanan maupun di lampu merah. Oleh karena itu Dinas Sosial juga sedang merencanakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dan ikut membantu menyelesaikan masalah pengemis di Kota Tangerang agar terciptanya lingkungan yang bebas dari pengemis.

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Manajemen Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori tersebut memiliki 4 dimensi yakni Pengamatan Lingkungan (*Environmental Scanning*), Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), dan Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*). Didalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*) oleh Dinas Sosial Kota Tangerang. Adapun Pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai pelaksanaan Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang yakni sebagai berikut :

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

- a. Program. Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru.
- b. Anggaran. Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
- c. Prosedur. Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Wujud nyata pemerintah dalam upaya melindungi dan mensejahterakan masyarakat diantaranya adalah kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan sebuah pembinaan dan pelatihan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka mengurangi masalah kesejahteraan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada para pengemis yang ada di jalanan, maka perlunya dilaksanakannya program rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya kepada para pengemis. Pemerintah

menilai dengan adanya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tersebut dapat mengurangi angka jumlah para pengemis yang ada di Kota Tangerang dikarenakan didalam peraturan daerah tersebut sudah tertulis tentang pelarangan bagi para pengemis untuk melakukan aktivitasnya di jalan dan juga larangan mengenai pemberian uang ataupun barang kepada para pengemis akan dikenakan sanksi tegas dan juga hukuman berupa denda atau hukuman penjara.

Dasar Hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan peraturan daerah (perda) Nomor 5 Tahun 2012 diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6497) sudah dijelaskan terdapat 26 PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan dibagi menjadi 7 Kriteria seperti Fakir Miskin, Komunitas Terpencil, Anak Terlantar, Para Penyandang Cacat dan Tuna Susila, Korban Kekerasan, Korban Bencana, Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dan untuk gelandangan dan pengemis, anak jalanan, pengamen itu termasuk kedalam kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Implementasi Strategi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang sebagai bentuk kebijakan publik terkait masalah pengemis dianalisis menggunakan teori Implementasi Strategi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, yaitu program, anggaran dan prosedur mendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

Program dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 dimana temuan yang menjadi kelemahan yaitu program rehabilitasi sosial masih berjalan kurang efektif, hal ini dikarenakan dalam menjalankan program tersebut Dinas Sosial masih harus mengirimkan para pengemis yang sudah tertangkap operasi razia oleh satpol pp ke Panti PSBK Pangudi Luhur yang ada di Bekasi, seharusnya pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang sudah memiliki Panti Rehabilitasi Sosial sendiri untuk bisa menjalankan program pembinaan dan pelatihan kepada para pengemis tersebut bisa berjalan dengan mandiri. Dengan begitu Dinas Sosial Kota Tangerang hanya bisa melakukan operasi razia dan melakukan pendataan kepada para pengemis tersebut. Selanjutnya dalam hal penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 masih adanya masalah yang tidak terlaksanakan yaitu didalam peraturan daerah tersebut sudah dituliskan mengenai larangan dan hukuman bagi para pengemis yang beraktivitas di jalanan maupun di tempat umum dan juga bagi masyarakat yang memberikan uang kepada para pengemis di jalanan, akan tetapi larangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya hal ini juga dikarenakan para pengemis tidak memperdulikan dengan adanya peraturan daerah dan juga larangan atau hukuman tersebut yang membuat para pengemis sendiri tidak takut untuk melakukan aktivitasnya di jalanan maupun di tempat umum sekalipun, dan juga berkaitan dengan hal tersebut masih adanya masyarakat Kota Tangerang yang memberikan uang kepada para pengemis dengan rasa kasihan atau rasa iba melihatnya. Maka dari itu peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tidak terimplementasikan dengan baik di Kota Tangerang.

Anggaran dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 dimana temuan yang menjadi keunggulan adalah jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang sudah mencukupi untuk kebutuhan setiap program kegiatan, dengan begitu anggaran tersebut bisa digunakan demi kelancaran dalam menjalankan program tersebut. Dalam hal ini juga memang suatu anggaran sangatlah dibutuhkan untuk menunjang dalam suatu kegiatan agar berjalan dengan baik. Hanya saja Pemerintah Dinas Sosial sendiri masih mencari lahan untuk pembuatan Panti Rehabilitasi Sosial sendiri agar demi kelancaran dalam menjalankan sebuah program Rehabilitasi Sosial di Kota Tangerang.

Prosedur dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012, dimana temuan yang dinilai sebagai kelemahan adalah didalam prosedur Dinas Sosial kegiatan pengawasan jarang sekali terlihat di lapangan, kejadian tersebut memang melakukan pengawasan terhadap para pengemis dinilai masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan pemerintah Dinas Sosial Kota Tangerang sangat jarang sekali melakukan pemantauan terhadap para pengemis di jalanan di Kota Tangerang sehingga para pengemis tersebut sangat bebas dan mudah sekali melakukan aktivitasnya di jalanan. Selanjutnya didalam prosedur Dinas Sosial juga ada kegiatan melakukan pendataan dan introgasi kepada para pengemis yang tertangkap operasi razia, dimana pendataan tersebut dilakukan di Dinas Sosial dan di Rumah Singgah, yang uniknya terkait dengan hal tersebut para pengemis yang berhasil tertangkap oleh satpol pp dalam operasi razia rata rata berasal dari daerah luar Kota Tangerang. Para pengemis ini memang sengaja datang ke Kota Tangerang untuk melakukan aktivitasnya dalam mencari uang untuk menunjang

kehidupannya sehari-hari. Ini dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan atau uang di daerah asalnya maupun di daerah Kota Tangerang sendiri.

Dengan demikian Dinas Sosial Kota Tangerang sebagai badan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan badan yang berperan terutama dalam pembinaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah serta dengan pembentukan citra positif di Kota Tangerang.

Dari penelitian mengenai Implementasi strategi dapat disimpulkan bahwasannya, pihak Dinas Sosial Kota Tangerang sudah dapat menjalankan dengan baik perannya sebagai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen namun peranannya dalam masyarakat masih kurang baik meskipun program kerja dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang berbasis kepada masyarakat namun kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat kurang mengetahui mengenai segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian “Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang” yang dianalisis dengan menggunakan Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger sebagai panduan dalam menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang. Model teori Implementasi dari Thomas L. Wheelen dan David J. Hunger, yaitu Program, Anggaran, Prosedur. Aspek program dinilai sudah cukup optimal, sedangkan aspek anggaran dan prosedur dinilai belum optimal. Dengan demikian, Implementasi dinilai belum optimal dilaksanakan dan harus ditingkatkan.

Temuan penelitian terkait Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang yang dinilai sebagai kelemahan meliputi, (1) Dinas Sosial masih kurang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang, dikarenakan bahwa didalam peraturan daerah tersebut sudah tertera adanya larangan memberikan uang ataupun barang kepada para pengemis di jalanan, dan tercantumkan denda dan juga hukuman buat yang telah memberikan uang ataupun barang kepada pengemis, akan tetapi masih adanya masyarakat yang melanggar ataupun memberikan uang kepada para

pengemis tersebut. (2) Para pengemis yang ada di Kota Tangerang pada umumnya berasal dari luar Kota Tangerang dan para pengemis tersebut selalu kembali ke jalanan walaupun mereka sudah terkena razia dan bahkan sudah pernah menjalani masa rehabilitasi. (3) Kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan suatu pengendalian terhadap para pengemis, seperti melakukan pemantauan secara rutin sehingga para pengemis di jalanan akan merasa bebas dan tidak terasa takut dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. (4) Dinas Sosial Kota Tangerang masih kesulitan dalam mencari lahan untuk membuat Panti Rehabilitasi Sosial sendiri, walaupun anggaran ataupun dana sudah disediakan oleh pemerintah untuk membuat panti rehabilitasi sosial tersebut, maka dari itu Dinas Sosial selalu mengirimkan para pengemis yang sudah tertangkap razia oleh Satpol PP ke PSBK Pangudi Luhur Bekasi untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan selama 6 bulan.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran berkaitan dengan Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis di Kota Tangerang sebagai berikut :

- a. Diharapkan Dinas Sosial harus lebih menegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang, yang terpenting dalam hal penegakkan larangan yang sudah dibuat membuat program sosialisasi kepada masyarakat Kota Tangerang supaya lebih mengetahui peraturan

pemerintah dan agar dapat menanggulangi masalah pengemis di Kota Tangerang.

- b. Diharapkan Dinas Sosial harus bisa memastikan bahwa para pengemis berkurang jumlahnya dalam setiap bulannya dan diharapkan untuk para pengemis bisa hidup lebih mandiri lagi setelah dilakukannya masa pembinaan dan pelatihan agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan untuk mengemis di Kota Tangerang.
- c. Diharapkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian seharusnya Dinas Sosial dan para instansi terkait harus lebih rutin dan harus melakukan pemantauan lebih giat lagi agar para pengemis merasa takut dan mereka akan merasa terawasi, dengan begitu para pengemis akan pindah tempat ataupun mereka tidak akan melakukan aktivitasnya di jalanan.
- d. Diharapkan Dinas Sosial Kota Tangerang harus segera membuat Panti Rehabilitasi Sosial sendiri agar dapat terlaksananya program rehabilitasi sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga tidak harus mengirimkan para pengemis ke PSBK Pangudi Luhur yang ada di Bekasi untuk melakukan sebuah pembinaan dan pelatihan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Campbell, Andrew and Marcus Alexander. 1997. "What's wrong with strategy?" Selected Reading, hlm. 2-8. Massachusetts: Harvard Business Review.
- David, Fred R. 2004. *Konsep Manajemen Strategis*. Klaten : Penerbit Indeks.
- Glueck, W. F. & Lawrence, R.J. 1999. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hunger & Thomas L. Wheelen, J. David. 2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, Mathew and Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif (Buku Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mintzberg, Henry, Bruce W. Ahlstrand & Joseph Lampel. 1998. *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. California: Free Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rumelt, Richard P. 1997. *Good Strategy Bad Strategy*. United States: Crown Business.
- Siagian, S. P. 1986. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Simamora, Bilson. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiharto, I. Bambang & Agus Rachmat W. 2000. *Wajah Baru Etika dan Agama*. Jakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 1993. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, Tunggal Amin. 2004. *Manajemen Strategik. Edisi Pertama*. Jakarta: Harvarindo.

Dokumen

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yakni tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Tangerang.

Sumber Lain :

Skripsi

Kesumawindayati, Nungkei Feriustika. 2014. *Strategi Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru*. Riau : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Putra, Irvan Ade. 2014. *Peranan Dinas Sosial dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Riau : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

Anastasia, Puspita W. 2013. *Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-manajemen-fungsi-manajemen.html> (Diakses pada hari Senin, 4 September 2017, pukul 09:52 WIB)

<https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/manajemen-publik/apa-itu-manajemen-publik/> (Diakses pada hari Jumat, 11 Agustus 2017, pukul 14:12 WIB)

<https://bonteng.wordpress.com/2009/11/18/3-teori-manajemen-strategi/> (Diakses pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, pukul 12:32 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen> (Diakses pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, pukul 11:11 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Publik> (Diakses pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, pukul 11:21 WIB)

<http://palapanews.com/2016/04/01/dinsos-kota-tangerang-kewalahan-tangani-pengemis/> (Diakses pada hari Selasa, 07 Maret 2017, pukul 14:18 WIB)

<http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-pengemis-menurut-ahli.html> (Diakses pada hari Selasa, 07 Maret 2017, pukul 15:15 WIB)

<http://prasetiapramana.blogspot.co.id/2010/02/manajemen-strategik-3-teori-manajemen.html> (Diakses pada hari Kamis, 18 Mei 2017, pukul 13:20 WIB)

<http://tangselpos.co.id/2016/02/12/dinas-sosial-kelimpungan-atasi-gelandangan/> (Diakses pada hari Selasa, 13 Juni 2017, pukul 10:32 WIB)

<http://www.tangerangkota.go.id/geografi> (Diakses pada hari Jumat, 2 Februari 2018, pukul 14:48 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang (Diakses pada hari Rabu, 25 April 2018, pukul 19:13 WIB)

<http://putrinurlaelasari.blogspot.com/2015/12/pengertian-pengemis-dan-faktor-faktor.html> (Diakses pada hari Kamis, 24 Januari 2019, pukul 10:57 WIB)

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN
PENGAMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintah maupun non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak;
 - b. bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyandang Cacat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6497);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
DAN
WALIKOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah** Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
4. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
5. **Dinas adalah** Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. **Kesejahteraan Sosial adalah** suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggungjawab sosial.
7. **Organisasi Sosial adalah** suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
8. **Hak Asasi Manusia adalah** seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. **Hak Anak adalah** bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. **Kesejahteraan Anak adalah** suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
11. **Anak adalah** seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
12. **Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah** anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat tempat umum.
13. **Anak jalanan yang mempunyai masalah dijalan adalah** anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum.
14. **Perlindungan Anak adalah** segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalan.
15. **Jalanan adalah** tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. **Gelandangan adalah** seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
17. **Pengemis adalah** seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalan dan/atau ditempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. **Eks Penyandang Penyakit Kusta adalah** seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.

19. **Pengamen adalah** seseorang atau sekelompok yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.
20. **Pembinaan Pencegahan adalah** kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dijalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
21. **Pembinaan Lanjutan adalah** kegiatan yang dilaksanakan secara terencana terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
22. **Usaha Rehabilitas Sosial adalah** proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan pembeli fungsi sosialnya dalam tantangan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
23. **Pembinaan adalah** segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
24. **Eksplotasi adalah** memanfaatkan memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
25. **Pelaku Eksplotasi adalah** seseorang atau kelompok yang memperlak dengan memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
26. **Keluarga adalah** unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat yang ketiga.

27. **Lembaga yang mengatasnamakan Lembaga Sosial (Panti Asuhan) adalah** organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan ditempat umum dengan cara mengemis.
28. **Jalan Umum adalah** adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Azas Pengayoman;
- b. Azas Kemanusiaan;
- c. Azas Kekeluargaan;
- d. Azas Keadilan;
- e. Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Azas keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

Pasal 4

Sasaran Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :

- a. Anak yang berada di jalanan yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. Pengamen yang melakukan aktifitas di jalan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan Psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di jalanan;
- d. Pengguna jalan yang memberikan uang dan/atau barang di jalan dengan alasan beramal dan karena alasan belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. Orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. Pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

- c. Sosialisasi;
 - d. Kampanye;
- (4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
 - b. Pengendalian sewaktu-waktu;
 - c. Penampungan sementara;
 - d. Pendekatan awal;
 - e. Pengungkapan dan permasalahan masalah (assesment);
 - f. Pendampingan sosial pendampingan social dan penjangkauan;
 - g. Rujukan.
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem panti dan/atau diluar panti.
- (6) Diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pembinaan terhadap keluarga.

BAB IV PEMBERDAYAAN DAN BIMBINGAN LANJUTAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan dan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu porses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

- (4) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial professional, pekerja sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
 - b. Pelatihan kewirausahaan;
 - c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);
 - d. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE);
 - e. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Bimbingan Lanjutan

Pasal 8

- (1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan usaha;
 - b. Organisasi kemasyarakatan;
 - c. Perseorangan;
 - d. Organisasi sosial;
 - e. Yayasan;
 - f. Lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. Pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya menyediakan dana pembinaan.

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Peran serta masyarakat yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di jalan umum.
- (3) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen yang beraktifitas di jalan umum serta mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di jalan umum.

Pasal 11

Masyarakat yang berkeinginan untuk memberi uang/barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang berbadan hukum.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-kurangnya sampai jenjang pendidikan menengah kepada anak jalanan yang berusia sekolah.
- (4) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru dan mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara, menyayangi teman serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya sehingga dapat melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (5) Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggungjawab dalam mengurus, memelihara, melindungi, anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
- (6) Setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
- (7) Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati serta menjamin hak azasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental anak.

Pasal 13

- (1) Pengemis eks kusta yang karena kondisi fisiknya tidak bisa bekerja, diberikan bantuan sosial atau kompensasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial atau kompensasi bagi pengemis eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana :
 - a. Panti sosial;
 - b. Pusat rehabilitasi sosial;
 - c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pusat kesejahteraan sosial;
 - e. Rumah singgah; dan
 - f. Rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN Pasal 15

Anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalan umum.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dikenakan sanksi pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen usia dewasa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka.
 - e. Atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang bukti dan atau penggeledahan badan, pakaian atau rumah atau pekarangan atau tempat tertutup lainnya.
 - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan POLRI karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak azasi manusia.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan selambat lambatnya Tahun 2014.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 4 Juli 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
pada tanggal : 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak CARYO WIJAYA, MDSSp di Dinas
Sosial Kota Tangerang)



(Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bobby Ertanto, M.Si di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)



(Peneliti melakukan wawancara dengan pengemis di pinggir jalan raya di Kota Tangerang)



(Pengemis yang tertangkap razia oleh Satpol PP Kota Tangerang)



(Gambar Pengemis di Jalanan)



(Gambar di PSBK Pangudi Luhur Bekasi)





(Para Pengemis sedang melakukan pelatihan di PSBK Pangudi Luhur Bekasi)



(Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengemis binaan PSBK Panti
Pangudi Luhur Bekasi dan Gambar tempat asrama para pengemis)



(Peneliti melakukan wawancara dengan petugas di Rumah Singgah Dinas Sosial)

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Iing Riskomar, S.Sos, M.Si.

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Caryo Wijaya, MDSSp

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bobby Ertanto, M.Si

Pekerjaan/Jabatan : Kepala seksi Operasi dan Pengendalian di Satpol PP

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham

Pekerjaan/Jabatan : Petugas PSBK Pangudi Luhur Bekasi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hudin

Pekerjaan/Jabatan : Petugas Rumah Singgah Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rosidah

Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat

Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toni

Pekerjaan/Jabatan : Masyarakat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhartini dan Iroh

Pekerjaan/Jabatan : Pengemis

Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aji Dewantoro

NIM : 6661131458

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian

MEMBER CHECK

Nama : Drs. Ing Riskomar, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial

Peneliti : **Bagaimana pandangan mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang ?**

Sumber : Mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang memang menjadi salah satu tugas kita ya, kalau dilihat dari jumlah kita tidak bisa pastikan jumlahnya, di karenakan mereka itu berasal dari luar dan mereka itu nomaden sering berpindah pindah tempat. Kita selalu melakukan operasi razia bersama dengan Satpol PP dan lalu kita bawa ke PSBK (Panti Sosial Bina Karya) Bekasi, disana mereka di berikan sebuah bimbingan dan motivasi. Namun terkadang mereka suka kembali lagi ke jalan setelah melakukan pembinaan.

Peneliti : **Apakah Sumber Daya yang dimiliki telah memadai dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Untuk SDM sendiri kita sudah mencukupi ya, disini ada yang bagian perencanaan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Ini kita juga bekerja sama dengan Satpol PP untuk saling bahu membahu mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini, kita disini bertugas untuk menyadarkan mereka dengan memberikan pengarahan dan juga pembinaan sedangkan Satpol PP sendiri yang mengeksekusinya dengan melakukan operasi razia secara rutin.

Peneliti : **Sudah sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Dalam pelaksanaan misi kita sendiri untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini sudah melakukan rencana rencana yang sudah kita buat yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tadi, dengan begitu pelaksanaan yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan tupoksinya.

Peneliti : **Tujuan apa yang ingin diselesaikan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Ya untuk tujuannya mah inginnya kami sebagai pemerintah ingin mengentaskan masalah PMKS kalo tujuan secara umumnya mah itu, seperti kemiskinan, pengangguran. Nah kalau untuk gepeng ini Sebenarnya tujuan kita itu cuman 1 yaitu supaya mereka itu sadar, dan agar mereka tidak kembali melakukan ngemis. Tapi sulitnya mereka itu suka kembali ke jalan dan melakukan mengemis.

Peneliti : **Adakah pengembangan strategi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Pengembangan strategi yang kita lakukan sih masih seperti dulu ya dengan melakukan operasi razia dengan Satpol PP dan dikirimkan ke Dinas Sosial untuk diberikan pengarahan dan selanjutnya dikirim ke panti sosial di bekasi.

Peneliti : **Pedoman apa yang digunakan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Kalau untuk pedoman sendiri kita sudah mengacu dan melaksanakan peraturan daerah kota tangerang yang tercantum dalam peraturan daerah kota tangerang nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Peneliti : **Apakah ada program baru yang akan dilakukan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Untuk tahun 2019 nantinya Dinas Sosial sendiri itu akan merencanakan suatu pelatihan yang praktis dan juga memberikan suatu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan mantan gelandangan dan pengemis guna memberikan sebuah penjelasan dari apa yang telah mereka alami dan juga agar masyarakat lebih mengetahui masalah gelandangan dan pengemis ini dan diberikan penjelasan mengenai peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 yakni pasal 16 ayat 1 mengenai setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalanan umum di Kota Tangerang. Dengan begitu masyarakat kota tangerang pun nantinya akan ikut berkontribusi dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis secara bersama sama. Kalau untuk pelatihan dan pembinaan sendiri Dinas Sosial nanti akan memberikan suatu pelatihan yang praktis dalam arti harus sesuai

dengan keinginan mereka (gelandangan dan pengemis) agar mereka juga mau terus belajar dan bekerja lebih giat lagi dan juga dengan memberikan pendekatan keagamaan untuk lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Esa.

Peneliti : **Apakah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mencukupi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Kalau soal anggaran ya pasti ada, iya mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita lakukan mulai dari anggaran untuk pembinaan, membuat fasilitas untuk menunjang dalam masa pembinaan dan juga untuk mereka agar bisa hidup lebih mandiri lagi.

Peneliti : **Adakah rencana anggaran khusus yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang kepada pemerintah daerah Kota Tangerang ?**

Sumber : Anggaran khusus ada sebenarnya tahun 2017 lalu pihaknya sudah menyediakan pagu anggaran untuk pembangunan panti rehabilitasi sosial. Namun anggaran itu tidak terserap karena kesulitan mencari lahan. Kami memang sangat membutuhkan panti rehabilitasi sosial untuk menangani PMKS yang ada di Kota Tangerang. Kalau yang sekarang setelah menerima hasil operasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan langsung dikirim ke Bekasi.

Peneliti : **Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Satpol PP Kota Tangerang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang ?**

Sumber : Kalau dari dinas sosial sendiri tahapan kita itu pertama kita melakukan operasi razia yang dilakukan oleh satpol pp selanjutnya setelah melakukan operasi razia, kita akan memberikan sebuah arahan atau pembinaan secara lisan, selanjutnya kita tidak langsung kirim ke panti PSBK bekasi, kita bawa mereka ke rumah singgah terlebih dahulu, disini mereka hanya di data dan klasifikasikan berdasarkan kriteria jenis PMKS mereka, lalu baru mereka ini dibawa ke panti sosial PSBK Pangudi Luhur di Bekasi untuk diberikan sebuah pembinaan secara langsung selama 6 bulan seperti itu.

Peneliti : **Apa hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prosedur tersebut ?**

Sumber : Kendalanya ya kadang-kadang kalo dirazia itu si gepeng nya itu balik lagi balik lagi kaya gak kapok-kapok, terus juga kategori kaya anak punk itu yang masih samar, itu masuknya kemana nih, anak jalanan atau apa gitu kalo anak jalanan ada seksinya lagi, kalo yang pake narkoba atau orang yang gila ada juga seksinya disini tapi kadang-kadang di tangani oleh seksi kita juga. Ya emang susah juga kita mengkategorikannya juga, ya jadi kendalanya itu kita susah buat mengkategorikannya.

Peneliti : **Bagaimana pengendalian yang dilakukan setelah melakukan operasi penjarangan glandangan dan pengemis agar tidak dapat kembali lagi ?**

Sumber : Pengendalian dilakukan dengan membawa mereka pangudi luhur bekas untuk diberikan sebuah pembinaan khusus selama 6 bulan setelah itu mereka akan dipulangkan ke daerahnya masing masing. Kalo pengawasan dari kita sih cuman turun ke jalanan terus ngontrol gepeng itu masih banyak ga atau yang kemaren kita rehab itu turun lagi ga ke jalan, kalo misalkan jalan-jalan sepi dari gepeng kan berarti berhasil program kita ini.

Peneliti : **Apakah ada standar kinerja yang telah diterapkan ?**

Sumber : Yang menjadikan standar kinerja minimal kita mengurangi jumlah gepeng tiap tahunnya untuk meminimalisir, dan juga tolak ukurnya misalkan kita melatih sepuluh orang, ya terlaksanakannya juga sepuluh orang, ya kita mencapai apa yang ditargetkan lah bisa di bilang begitu.

Peneliti : **Bagaimana Hasil kinerja yang telah dicapai setiap bulannya ?**

Sumber : Hasil dari setiap bulannya kita sendiri masih sama saja, dari bulan ke bulan soalnya apa yang kita razia itu terkadang kan sama saja orangnya, saya ada kok datanya berapa jumlah yang sudah terazia setiap bulannya sudah kita rekap semua.

Informan Penelitian

MEMBER CHECK

Nama : Bobby Ertanto, M.Si

Jabatan : Kepala seksi Operasi dan Pengendalian di Satpol PP

Peneliti : **Bagaimana pandangan mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang ?**

Sumber : Dalam temuan hasil di lapangan, para gelandangan dan pengemis mereka itu melakukan aktivitasnya lebih banyak di daerah lampu merah dan biasanya mereka keluar pada sore dan juga malam hari. Karena kita juga selalu melakukan operasi secara diam diam dengan berkeliling kota tangerang untuk melihat keadaan yang terjadi di tempat mereka melakukan kegiatannya.

Peneliti : **Apakah Sumber Daya yang dimiliki telah memadai dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Masalah SDM kita disini itu membuat 2 tim yaitu ada tim burhan yaitu sebagai tim yang melakukan penyamaran (Mata mata) dan yang satunya lagi yaitu tim Alap Alap dan pasukan reguler yang bertugas untuk melakukan eksekusi penangkapan kepada gelandangan dan pengemis.

Peneliti : **Tujuan apa yang ingin diselesaikan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Tugas Satpol PP itu cuma eksekutor pembinaannya kan dari Dinsos, tugas kita tuh cuma sedikit cuma pelarangan saja. Ya disini yang menjadi tolak ukur kita para gepeng ini ga balik lagi ke jalan, dan masyarakatnya juga sadar kalo ngasih para pengamen pengemis itu dilarang, jadi kalo misalkan ada gepeng yang minta-minta coba lah jangan dikasih, ya walaupun istilahnya kita ngerasa ga tega iba ke si gepeng itu. Soalnya nanti kebiasaan buat para si gepeng. soanya ya tujuan kita itu juga dengan melaksanakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 yang diberikan oleh pemerintah, agar tetap berjalan sesuai dengan berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan tupoksinya.

Peneliti : **Pedoman apa yang digunakan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Kita melaksanakan tugas melalui pedoman peraturan daerah kota tangerang. Yang kita lakukan hanya melakukan penangkapan razia dan pengawasan di tempat tempat tertentu.

Peneliti : **Apakah ada program baru yang akan dilakukan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Untuk program seperti pembinaan dan rehabilitasi dan bantuan lain-lain adalah tugas dari Dinas Sosial, dalam kapasitas kita itu tugas pokoknya hanya mengeksekusi dari tempat kejadian terus dikirim ke dinas sosial, yang buat program ini kan dinas sosial, jadi yang ngebina, ngerehab, yang ngasih bantuan itu Dinas Sosial dan juga perencanaan dan segala sesuatunya ada di Dinas Sosial, soalnya mereka yang buat programnya.

Peneliti : **Apakah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mencukupi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Untuk anggaran sendiri kita hanya untuk kendaraan operasional kita dalam proses operasi razia selebihnya kita untuk jaminan dan lain lain.

Peneliti : **Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Satpol PP Kota Tangerang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang ?**

Sumber : Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri yaitu dengan yang pertama itu pimpinan memberikan arahan anggota yang bertugas, yang kedua mempersiapkan kendaraan operasional, yang ketiga melaksanakan apel untuk memberi arahan kepada anggota yang bertugas, yang keempat pemberian surat perintah kepada danton atau kepada pemimpin regu, yang kelima melakukan pelaksanaan perintah, yang keenam melakukan pendataan lalu dibawa ke Dinas Sosial.

Peneliti : **Apa hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prosedur tersebut ?**

Sumber : Kalau hambatan sendiri sih terkadang mereka itu sudah tau kalau nantinya ada kegiatan operasi razia yang kita lakukan. Jadinya mereka suka kabur atau melarikan diri supaya tidak tertangkap saat operasi razia. Memang itu terkadang para gepeng itu pas kita samperin itu

pada lari, terus dari si gepeng itu juga kurang keterbukaan kitakan jadinya susah buat ngedatanya. Kita juga butuh kerjasama dari masyarakat untuk berperan untuk ikut dalam program ini ya minimal ikut mengikuti peraturan yang ada, kan di perda juga ada pelarangan buat ngasih para gepeng.

Peneliti : **Bagaimana pengendalian yang dilakukan setelah melakukan operasi penjarangan gelandangan dan pengemis agar tidak dapat kembali lagi ?**

Sumber : Untuk pengendalian sendiri kita pasti selalu melakukan yang namanya pengawasan. Pengawasannya juga kita lakukan dengan turun ke jalan langsung setiap hari secara rutin mulai pagi hingga malam secara bergantian. Supaya tau mereka itu dimana aja dan sampe kapan mereka seperti itu.

Peneliti : **Apakah ada standar kinerja yang telah diterapkan ?**

Sumber : Tugas Satpol PP itu cuma eksekutor pembinaannya kan dari Dinsos, tugas kita tuh cuma sedikit cuma pelarangan saja. Ya disini yang menjadi tolak ukur kita para gepeng ini ga balik lagi ke jalan, dan masyarakatnya juga sadar kalo ngasih para pengamen pengemis itu dilarang.

Informan Penelitian

MEMBER CHECK

Nama : Caryo Wijaya, MDSSp

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Sosial

Peneliti : **Bagaimana pandangan mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang ?**

Sumber : Untuk masalah gelandangan dan pengemis ini memang terbilang sulit ya, ini dikarenakan pada saat kita sudah melakukan razia dan di beri pelatihan pasti ada saja yang kembali lagi untuk melakukan ngemis dan yang kembali lagi itu orang yang sama yang sudah pernah kita razia dan ada juga yang pendatang baru. Gelandangan dan pengemis ini pasti untuk di daerah lain juga ada. Soalnya mereka itu memang hidup dijalan dan mencari uang di sana. Kalau untuk kita sendiri memang sangat mengganggu di karenakan itu juga sebagai cerminan untuk kota kita sendiri. Berarti di kota kita sendiri masih ada masalah seperti ini.

Peneliti : **Apakah Sumber Daya yang dimiliki telah memadai dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Di Dinas Sosial ini soal SDM nya sudah bagus ya hanya kita tinggal pelaksanaan perdanya aja yang lagi kita tekankan supaya bisa mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini.

Peneliti : **Sudah sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Disini kita ada 7 Misi Organisasi yang harus kita laksanakan termasuk salah satunya ya ini, mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para gepeng sesuai dengan perda yang ada.

Peneliti : **Tujuan apa yang ingin diselesaikan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Di tahun 2018 ini penegakan perda (peraturan daerah) kita bersama sama dengan Satpol PP itu continue terus menerus melakukan operasi di jalan seperti gelandangan, pengemis, dan lain lain. Di bulan Mei aja

kita udah lima kali melakukan operasi. Intinya Kota Tangerang ini nanti menjadi kota yang layak huni. Selain kita melakukan operasi, kita juga melakukan penjangkauan, dalam arti melihat titik titik yang biasanya mereka suka mangkal dan mereka yang tergolong PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6497) itu sudah dijelaskan terdapat 26 PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan dibagi menjadi 7 Kriteria seperti Fakir Miskin, Komunitas Terpencil, Anak Terlantar, Para Penyandang Cacat dan Tuna Susila, Korban Kekerasan, Korban Bencana, Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya, dan itu gelandangan dan pengemis, anak jalanan, pengamen itu termasuk kedalam kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), kalau yang kita kirim untuk menjahit pulangnyanya dapet mesin jahit, kalau ngelas dapet peralatan ngelas, intinya mereka bisa merubah nasib setelah diberikan bimbingan dan motivasi, intinya supaya mereka bisa bekerja secara mandiri dan bisa memenuhi dasar hidupnya, yang kita inginkan mereka bisa berkembang, dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti anak jalanan mereka juga di berikan pekerjaan seperti bekerja di tempat pembuangan sampah, dan Alhamdulillah mereka pun mau bekerja secara terus menerus.

Peneliti : **Adakah pengembangan strategi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Tidak ada pengembangan untuk Strategi yang kita lakukan masih sama belum adanya sebuah pengembangan strategi. Kita hanya menjalankan program rehabilitasi aja.

Peneliti : **Apakah ada program baru yang akan dilakukan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?**

Sumber : Kalau diliat dari dalam isi perdanya kita baru membuat program rehabilitasi sosial aja, buktinya disosialisasikan ke masyarakatnya juga belum ya, misalkan katanya orang-orang yang ngasih ke gepeng katanya kena sanksi nyatanya tidak kena sanksi. Sehingga perda itu belum kuat. Untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini.

Peneliti : **Adakah rencana anggaran khusus yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang kepada pemerintah daerah Kota Tangerang ?**

Sumber : Ya memang ada rencana anggaran khusus dari kita (Dinsos) kepada pemerintah daerah kota tangerang yaitu guna membuat panti rehabilitasi sosial sendiri di tangerang biar nggak usah dikirim ke Bekasi lagi.

Peneliti : **Bagaimana Hasil kinerja yang telah dicapai setiap bulannya ?**

Sumber : Yang pasti hasil dari kinerja yang kita lakukan yaitu jumlah gepeng atau anak jalanan itu berkurang, ada perubahan lah dari mereka untuk ngga ke jalanan lagi.

Informan Penelitian

Pedoman Wawancara

“Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu teori David J. Hunger dan Thomas L. Wheelen, dimana kriteria Manajemen Strategi meliputi 4 aspek, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

No.	Dimensi	Indikator	Substansi Pertanyaan	Kode Informan
1.	Pengamatan Lingkungan (<i>Environmental Scanning</i>)	1. Analisis Internal	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana pandangan mengenai masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang ?• Apakah Sumber Daya yang dimiliki telah memadai dalam menangani gelandangan dan pengemis ?	I ₁ I ₂ I ₃ I ₄ I ₅ I ₆ I ₇ I ₈ I ₉
		2. Analisis Eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya masalah gelandangan dan pengemis ?• Apakah masyarakat paham adanya Perda Nomor 5 Tahun 2012 ?• Sudah berapa lama anda menjadi gepeng ?• Berapa penghasilan anda dalam sehari ?• Darimana anda berasal ?• Mengapa anda lebih	

			memilih menjadi gepeng daripada yang lain ?
2.	Perumusan Strategi (<i>Strategy Formulation</i>)	1. Menentukan Misi	• Sudah sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam menangani gelandangan dan pengemis ?
		2. Menentukan Tujuan yang dapat dicapai	• Tujuan apa yang ingin diselesaikan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?
		3. Pengembang an Strategi	• Adakah pengembangan strategi untuk menangani gelandangan dan pengemis ?
		4. Penetapan Pedoman Kebijakan	• Pedoman apa yang digunakan dalam menangani gelandangan dan pengemis ?
3.	Implementasi Strategi (<i>Strategy Implementati on</i>)	1. Pengembang an Program	• Apakah ada program baru yang akan dibuat dalam menangani gelandangan dan pengemis ?

		2. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang sudah mencukupi untuk menangani gelandangan dan pengemis ? • Adakah rencana anggaran khusus yang diajukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang kepada pemerintah daerah Kota Tangerang ?
		3. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang dan Satpol PP Kota Tangerang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang ?
4.	Evaluasi dan Pengendalian (<i>Evaluation and Control</i>)	1. Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pengendalian yang dilakukan setelah melakukan operasi penjaringan gelandangan dan pengemis agar tidak dapat kembali lagi ?
		2. Standar Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada standar kinerja yang telah diterapkan ?
		3. Mengukur Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Hasil kinerja yang telah dicapai setiap tahunnya ?

(Sumber : Peneliti, 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Aji Dewantoro
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 04 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukabakti V No.16 B, RT/RW 004/015,
Sukasari, Tangerang, Kota Tangerang, 15118
Telepone : 085888338852

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1999 – 2001 TK Al Husna Kota Tangerang

2001 – 2007 SD Negeri 12 Kota Tangerang

2007 – 2010 SMP Negeri 4 Kota Tangerang

2010 – 2013 SMA Negeri 10 Kota Tangerang

Pengalaman Kerja

Praktek Kerja Lapangan di DPRD Kota Tangerang bagian keuangan